

# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024

## PERUBAHAN RENSTRA



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN  
( BAPPEDA DAN LITBANG )  
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417 Telp. (0283) 491694 – 492023



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 37  
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 maka perlu menyesuaikan Rencana Strategis Perangkat Daerah dikarenakan ada penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran, indikator dan target kinerja serta pendanaan indikatif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 103);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 140);
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

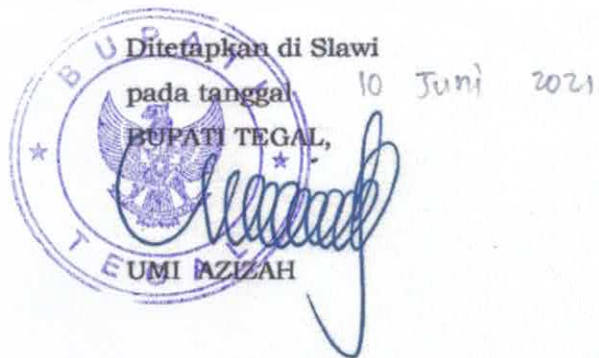
1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan pembangunan Tahun 2019-2024 serta pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

- (2) Pendanaan Indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kerangka pendanaan yang terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah pada tahun berkenaan.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah mempedomani Perubahan RPJMD;
- (2) Apabila terdapat perubahan kelembagaan perangkat daerah maka Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, target dan indikator kinerja program serta pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.



Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 10 Juni 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 43



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN  
(BAPPEDA DAN LITBANG)**

Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos : 52417  
Telp. : (0283) 491694, 492023, Fax. (0283) 492023

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN  
PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 050/020 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2024**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN  
PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 maka perlu menyesuaikan Rencana Strategis Perangkat Daerah dikarenakan ada penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran, indikator dan target kinerja serta pendanaan indikatif;



- c. bahwa guna kelancaran dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal 2009-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 140);

18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah mengumpulkan data, menganalisa data, dan merumuskan Perubahan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi  
pada tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN TEGAL

**BAMBANG KUSNANDAR ARIBAWA**



**Tembusan** ; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal ;
2. Inspektur Kabupaten Tegal ;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal ;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA  
DAN LITBANG KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 050/020/2021  
TANGGAL : 4 Januari 2021

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal	Penanggungjawab
2	Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal	Ketua
3	Perencana Madya pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal	Sekretaris
4	5 (lima) orang Kepala Bidang pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal	Anggota
5	8 (delapan) orang Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal	Anggota
6	3 (tiga) orang Pejabat Fungsional/Staf pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal	Anggota

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN TEGAL



**BAMBANG KUSNANDAR ARIBAWA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 dapat disusun. Perubahan Renstra merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan bagi perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah termasuk Bappeda dan Litbang untuk masa 5 (lima) Tahun kedepan. Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang juga menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Bappeda dan Litbang yang dituangkan dalam dokumen Renja Bappeda dan Litbang.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renstra ini masih banyak kekurangan sehingga perlu penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan berupa kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan Perubahan Renstra dan guna peningkatan kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal di waktu yang akan datang.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Perubahan Renstra ini. Semoga di tahun yang akan datang kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal dapat ditingkatkan dalam rangka memberikan pelayanan perencanaan dan kelitbangan bagi perangkat daerah maupun masyarakat guna mendukung pencapaian pembangunan di Kabupaten Tegal.

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. TEGAL



**BAMBANG KUSNANDAR ARIBAWA, SP., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690326 199403 1 004

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-8
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN TEGAL</b> .....	<b>II-1</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	II-1
2.2. Sumber Daya Bappeda dan Litbang .....	II-14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal.....	II-50
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN TEGAL</b> .....	<b>III-1</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda dan Litbang .....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	III-3
3.3. Telaah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah ....	III-5
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III-6
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	III-7
<b>BAB IV TUJUAN SAN SASARAN</b> .....	<b>IV-1</b>
4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah ....	IV-1
4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah....	IV-2
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>V-1</b>
5.1. Strategi .....	V-1
5.2. Pengarusatamaan dalam Pembangunan.....	V-3
5.3. Kebijakan .....	V-3
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>VI-1</b>
6.1. Program .....	VI-1
6.2. Kegiatan .....	VI-3

<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URSUSAN...</b>	<b>VII-1</b>
7.1. Tujuan Sasaran RPJMD .....	VII-1
7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	VII-2
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>VII-1</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Tegal Menurut Golongan / Ruang dan Tingkat Pendidikan Tahun 2021.....	II-15
Tabel 2. 2	Sarana/Prasarana Bappeda Kabupaten Tegal .....	II-16
Tabel 2. 3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Periode 2014-2019) .....	II-20
Tabel 2. 4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Murni Periode 2014-2019).....	II-22
Tabel 2. 5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Perubahan Periode 2014-2019) .....	II-23
Tabel 2. 6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal 2014-2019 .....	II-26
Tabel 2. 7	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program Disusun Tepat Waktu Tahun 2016-2020.....	II-44
Tabel 2. 8	Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Tahun 2015-2019 .....	II-45
Tabel 2. 9	Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur Tahun 2015-2019 .....	II-46
Tabel 2.10	Tingkat Kesesuaian Rencana dan Realisasi Kegiatan Tahun 2015-2019 .....	II-47
Tabel 2.11	Tingkat Capaian Indikator Pembangunan Sesuai Target Tahun 2015-2019 .....	II-48
Tabel 2.12	Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Tahun 2015 – 2019.....	II-49
Tabel 3. 1	Pemetaan Permasalahan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal .....	III-2
Tabel 3. 2	Tujuan, Sasaran dan Strategi Bappeda Provinsi Jawa Tengah.....	III-5
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra 2019-2024 Murni).....	IV-3
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra 2019-2024 Perubahan).....	IV-4
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal.....	V-2

Tabel 5.2	Fokus Kebijakan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal 2020-2021.....	V-5
Tabel 5.3	Fokus Kebijakan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal 2022-2024 (Perubahan Renstra).....	V-6
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Renstra Murni).....	VI-9
Tabel 6.2	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Realisasi Tahun 2020 dan Target Tahun 2021 (Program, Kegiatan dan sub Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019).....	VI-20
Tabel 6.3	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Perubahan Renstra).....	VI-32
Tabel 7.1	Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang Mengacu Pada RPJMD (Renstra Murni).....	VII-1
Tabel 7.2	Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang Mengacu Pada RPJMD (Renstra Perubahan).....	VII-2
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang Mengacu Pada RPJMD (Renstra Murni).....	VII-3
Tabel 7.4	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang Mengacu Pada RPJMD (Renstra Perubahan).....	VII-4

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal.. .....	II-4
--	------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal telah menyusun Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Tegal Tahun 2019-2024, sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan di Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal dari Tahun 2019 sampai 2024. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali, karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya wabah pandemi Covid 19. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja serta struktur organisasi. Dampak Pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyesuaian kebijakan, pendanaan, target capaian kinerja makro dan IKU Daerah dan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu, setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk penyesuaian ulang nomenklatur program/kegiatan /subkegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama, dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan/subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal. Perubahan Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolak ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian IKU.

Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Tahun 2019-2024, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal 2019-2024 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat kabupaten dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat. Analisis terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 dan Renstra Kementerian PPN Tahun 2020- 2024 dilakukan dalam tahapan penyusunan Renstra untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten terhadap sasaran perangkat daerah terkait di tingkat provinsi dan lembaga terkait di tingkat pusat.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;



20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 103);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 147).

24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal.
25. Surat Edaran Bupati Nomor 50/23/4415/2020 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 telah ditetapkan pada tahun 2019, namun seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka perlu dilakukan Perubahan Renstra karena adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal.

Secara umum maksud disusunnya Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang untuk memberikan arah sekaligus acuan bagi komponen Bappeda dan Litbang dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Bappeda dan Litbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun ke depan, sehingga diharapkan segala sesuatu yang dilakukan akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah:

1. Sebagai pedoman bagi penyusunan rencana kerja Bappeda dan Litbang tahun 2022-2024 yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran program dan kegiatan yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi;
2. Sebagai pedoman bagi Bappeda dan Litbang untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal yang mengarah pada capaian tujuan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun nasional;
4. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja pelayanan Bappeda dan Litbang yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
5. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan penelitian pengembangan sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dokumen Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN TEGAL**

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN TEGAL**

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi, dan penentuan isu-isu strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menerangkan tentang rencana Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda dan Litbang dalam lima tahun mendatang.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai indikator kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran. Dan juga indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah.

## **BAB VII PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan dan harapan pemanfaatan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN TEGAL**

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal. Bappeda dan Litbang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Bappeda dan Litbang memiliki kewenangan :

- a. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
- b. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- c. Pelaksanaan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah
- d. Pelaksanaan perumusan rencana, pelaksanaan dan evaluasi Penelitian dan Pengembangan (Penelitian dan Pengembangan dan pengelolaan data, pengkajian, perencanaaan, pengoperasian dan evaluasi) sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan pemanfaatan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten/kota:
- g. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- h. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;

- i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten/kota;
- j. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten/kota;
- k. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
- l. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- m. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pengkajian di Penelitian dan Pengembangan;
- n. Penyusunan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- o. Penyusunan, strategi, fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi, teknologi dan kapasitas Penelitian dan Pengembangan;
- p. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;
- q. Penyelenggaraan kesekretariatan/ketatausahaan Badan.

Struktur organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah adalah sebagai berikut:

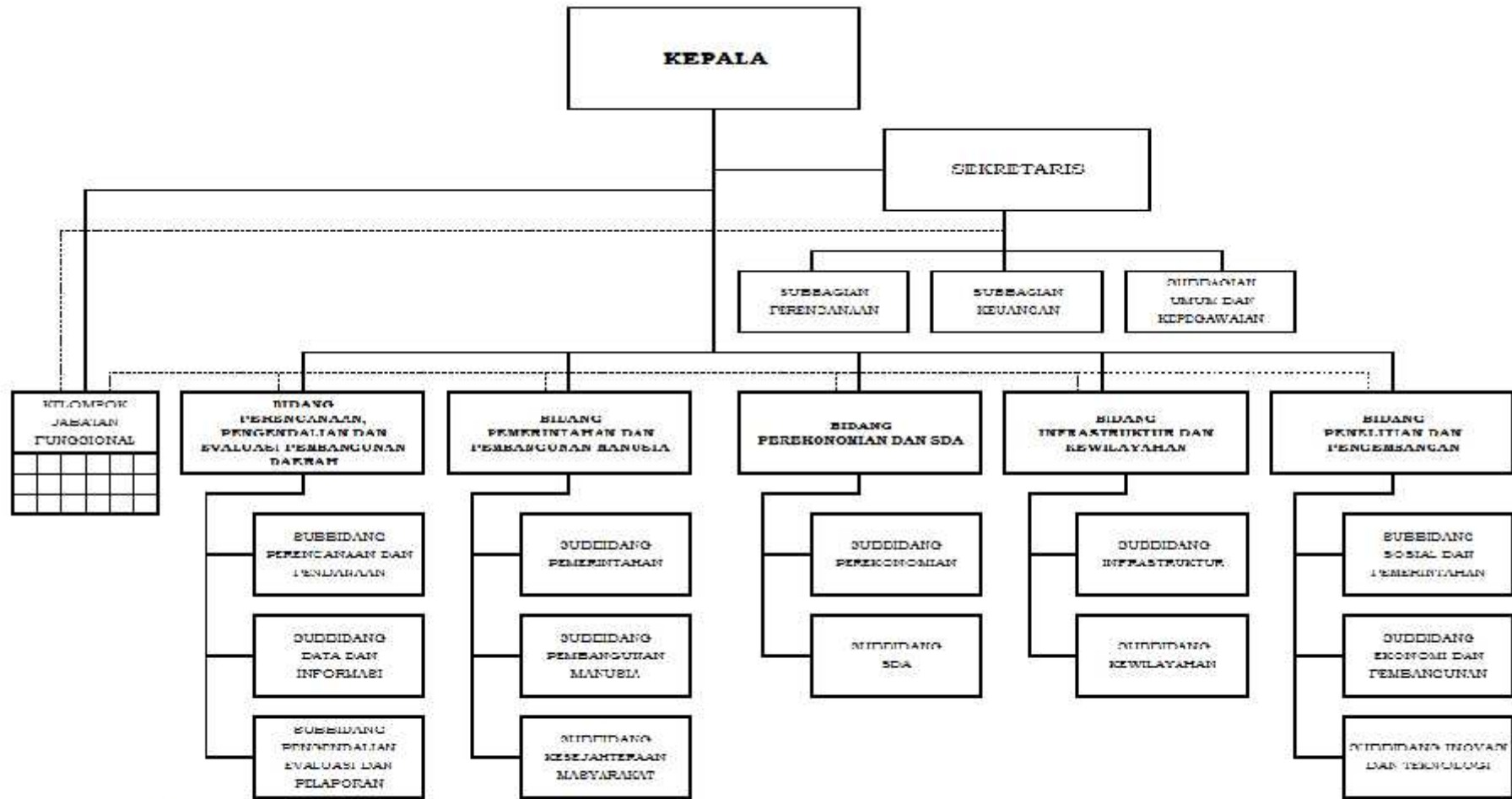
- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris
  - a. Kepala Subbagian Perencanaan
  - b. Kepala Subbagian Keuangan
  - c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  - a. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan
  - b. Kepala Subbidang Data dan Informasi
  - c. Kepala Subbidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
  - a. Kepala Subbidang Pemerintahan
  - b. Kepala Subbidang Pembangunan Manusia
  - c. Kepala Subbidang Kesejahteraan Masyarakat
5. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA
  - a. Kepala Subbidang Perekonomian
  - b. Kepala Subbidang SDA
6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
  - a. Kepala Subbidang Infrastruktur
  - b. Kepala Subbidang Kewilayahan
7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
  - a. Kepala Subbidang Sosial dan Pemerintahan
  - b. Kepala Subbidang Ekonomi dan Pembangunan
  - c. Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi tersebut sebagaimana Gambar 2.1 berikut:



**Gambar 2.1.**  
**Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal**



**KETERANGAN :**

- : Garis Komando
- - - : Garis Koordinasi

Sumber : Bappeda dan Litbang kabupaten Tegal, 2021

Sebagaimana Gambar 2.1 di atas, masing-masing unsur dari organisasi Bappeda memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala;

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai fungsi:

- 1) Penetapan rencana kerja;
- 2) Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan, dan informasi perencanaan pembangunan;
- 3) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah.;
- 4) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah.;
- 5) Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah.;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah.;
- 7) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah.;
- 8) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah.

2. Sekretaris

a. Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- 2) Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Badan;

- 3) Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Badan;
  - 4) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Badan;
  - 5) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Badan;
  - 6) Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas badan;
  - 7) Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
  - 8) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.
- b. Sekretaris membawahkan 3 (tiga) subbagian Perencanaan, Subbag Keuangan, dan Subbag Umum dan Kepegawaian, dengan fungsi :
- 1) Subbagian Perencanaan;
    - a) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
    - b) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan Badan;
    - c) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Badan;
    - d) Penelaahan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan;
    - e) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
    - f) Pelaksanaan pengembangan sistem informasi bidang perencanaan badan;
    - g) Pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
    - h) Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan.
  - 2) Subbagian Keuangan;
    - a) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

- b) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan Badan;
- c) Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan;
- d) Penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan keuangan Badan;
- e) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- a) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- c) Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e) Pengelolaan dan penatausahaan aset Badan;
- f) Pengelolaan kearsipan Badan;
- g) Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- h) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- 4) Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

- 5) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  - 6) Melakukan analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah;
  - 7) Mengoordinasikan penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
  - 8) Pelaksanaan konsultasi publik;
  - 9) Mengoordinasikan pelaksanaan Forum SKPD/lintas SKPD;
  - 10) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
  - 11) Pengoordinasian penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten;
  - 12) Melakukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - 13) Melakukan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan dan pembangunan SKPD;
  - 14) Penyusunan profil pembangunan daerah;
  - 15) Pengoordinasian pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten;
  - 16) Pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah; dan
  - 17) Melakukan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah.
  - 18) Pelaksanaan administrasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  - 19) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- b. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahkan 3 (tiga) subbidang yaitu Perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dengan fungsi :

- 1) Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan : melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbidang Perencanaan dan Pendanaan
- 2) Kepala Subbidang Data dan Informasi : melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbidang Data dan Informasi.
- 3) Kepala Subbidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan : melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

#### 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan perencanaan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan perencanaan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan perencanaan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 4) Pengelolaan dan fasilitasi program dan perencanaan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan perencanaan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- 6) Pelaksanaan administrasi di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- b. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahkan 3 (tiga) subbidang yaitu Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat dengan fungsi :
- 1) Kepala Subbidang Pemerintahan : melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam menyiapkan bahan pengoordinasian, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan dibidang Pemerintahan.
  - 2) Kepala Subbidang Pembangunan Manusia : melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam menyiapkan bahan pengoordinasian, asistensi, monitoring dan evaluasi perencanaan di bidang Pembangunan Manusia.
  - 3) Kepala Subbidang Kesejahteraan Masyarakat : melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam menyiapkan bahan pengoordinasian, asistensi, monitoring dan evaluasi perencanaan di bidang Kesejahteraan Masyarakat.

5. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA

- a. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA mempunyai fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan di bidang perekonomian dan SDA;
  - 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan SDA;
  - 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian dan SDA;
  - 4) Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang perekonomian dan SDA;

- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang perekonomian dan SDA;
  - 6) Pelaksanaan administrasi di bidang perekonomian dan SDA;
  - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang perekonomian dan SDA;
  - 8) Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan SDA;
  - 9) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten;
  - 10) Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - 11) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
  - 12) Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah.
- b. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA membawahkan 2 (dua) subbidang yaitu Perekonomian dan Infrastruktur dan Kewilayahan dengan fungsi :
- 1) Kepala Subbidang Perekonomian : melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perekonomian dan SDA dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbidang Perekonomian.
  - 2) Kepala Subbidang SDA : melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perekonomian dan SDA dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbidang SDA.
6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- a. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang



- Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - 4) Pengelolaan dan fasilitasi program di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - 6) Pelaksanaan administrasi di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - 8) Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - 9) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten;
  - 10) Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - 11) Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
  - 12) Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah.
- b. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA membawahkan 2 (dua) subbidang yaitu Infrastruktur, dan Kewilayahan dengan fungsi :
- 1) Kepala Subbidang Infrastruktur : melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbidang Infrastruktur.
  - 2) Kepala Subbidang Kewilayahan : melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan,

pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbidang Kewilayahan.

## 7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

### a. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- 1) pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) pengkoordinasian dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 3) pengkoordinasian dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 4) pengkoordinasian dalam pengelolaan dan fasilitasi program Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 5) pengkoordinasian dalam pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan;
- 6) pengkoordinasian dalam pelaksanaan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
- 7) pengkoordinasian dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 8) pengkoordinasian dalam pelaksanaan administrasi Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 9) pengkoordinasian dalam pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

### b. Kepala Bidang Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan 3 (tiga) subbidang yaitu Sosial dan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi dengan fungsi :

- 1) Kepala Subbidang Sosial dan Pemerintahan : melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi, dan edukasi dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan bidang sosial dan pemerintahan.

- 2) Kepala Subbidang Ekonomi dan Pembangunan : melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi, dan edukasi dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan bidang ekonomi dan pemerintahan.
- 3) Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi : melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi, dan edukasi kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program, fasilitasi inovasi daerah, pengembangan basis data Penelitian dan Pengembangan, penguatan kerjasama Penelitian dan Pengembangan, dan pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

#### 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi Badan sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## 2.2. Sumber Daya Bappeda dan Litbang

### 2.2.1 Sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu lingkungan strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas/fungsi suatu organisasi. Dalam hal ini ketersediaan SDM Bappeda yang berkualitas sebagai lingkungan strategis internal dapat diidentifikasi sebagai **strength (kekuatan)**. Hal ini dapat dicerminkan dari 45 orang karyawan (PNS) di Bappeda Kabupaten Tegal tahun 2021, 34 orang atau 75,56% karyawan mempunyai tingkat pendidikan tinggi (S1, S2

dan S3). Ketersediaan SDM yang berkualitas ini akan mendukung terwujudnya kinerja pelaksanaan tupoksi Bappeda. Kondisi SDM Bappeda Kabupaten Tegal tersebut dapat disajikan sebagaimana tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Tegal Menurut Golongan / Ruang dan Tingkat Pendidikan Tahun 2021**

Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	D3/ D4	S1	S2	S3	
IVC	-	-	-	-	-	-	-	14
IVB	-	-	-	-	-	-	-	
IVA	-	-	-	-	-	12	-	
IIID	-	-	-	3	6	-	-	27
IIIC	-	-	-	-	6	1	-	
IIIB	-	-	2	-	5	-	-	
IIIA	-	-	1	1	2	-	-	
IID	-	-	2	-	-	-	-	4
IIC	-	-	2	-	-	-	-	
IIB	-	-	-	-	-	-	-	
IIA	-	-	-	-	-	-	-	
ID	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah	-	-	7	4	19	14	1	45

*Sumber : Bappeda dan Litbang kabupaten Tegal, 2021*

### 2.2.2 Aset / modal

Selain SDM, sarana/prasarana merupakan lingkungan strategis internal yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi. Dilihat dari jumlah maupun kondisinya, sarana/prasarana yang dimiliki Bappeda Kabupaten Tegal relatif memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud. Adapun jenis, jumlah serta kondisi sarana/prasarana Bappeda Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Sarana/Prasarana Bappeda Kabupaten Tegal**

No	Nama / Jenis Barang	Kondisi			Jumlah	Ket
		Baik	Sedang	Rusak Berat		
1	Portable Generating Set	1	0	0	1	
2	Station Wagon	12	0	0	12	
3	Sepeda Motor	25		1	26	
4	Gerobak Tarik	2	0	0	2	
5	Global Positioning System (GPS)	2	0	0	2	
6	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	6		1	7	
7	Lemari Besi	2	0	0	2	
8	Rak Besi/Metal	2	0	1	3	
9	Filling Besi/Metal	35	0	3	38	
10	Lemari Kaca	2	0	0	2	
11	Estalase Kaca	1	0	0	1	
12	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Lain-lain	7	0	0	7	
13	Layar Proyektor/Screen	5	0	0	5	
14	Alat Kantor Lain-lain	18	0	1	19	
15	Lemari Kayu	19	0	0	19	
16	Rak Kayu	18	0	0	18	
17	Zice	2	0	0	2	
18	Meja Rapat	14	0	0	14	
19	Meja Tulis	6	0	0	6	
20	Meja Telpon	1	0	0	1	
21	Meja Reseption	1	0	0	1	
22	Kursi Rapat	15	0	0	15	
23	Meja Komputer	0	0	1	1	
24	Sofa	5	0	0	5	
25	Meubelair Lain-lain	180	0	0	180	
26	Mesin Potong Rumput	3	0	0	3	
27	Tempat Sampah	1	0	0	1	
28	Alat Pembersih Lain-lain	1	0	0	1	
29	Lemari Es	8	0	0	8	
30	AC Split	36	0	4	40	
31	Televisi	9	0	1	10	
32	Cassette Recorder	2	0	0	2	
33	Amplifiler	2	0	0	2	
34	Loudspeaker	11	0	0	11	
35	Sound System	1	0	0	1	
36	Microphone	3	0	0	3	

No	Nama / Jenis Barang	Kondisi			Jumlah	Ket
		Baik	Sedang	Rusak Berat		
37	Microphone Table Stand	1	0	0	1	
38	Unit Power Supply	2	0	2	4	
39	Camera Video	7	0	0	7	
40	Alat Hiasan/Gorden	1	0	0	1	
41	Mimbar/Podium	1	0	0	1	
42	Handy Cam	2	0	0	2	
43	Pompa Air	3	0	0	3	
44	Speaker Aktif	1	0	0	1	
45	Bak Tower Air	1	0	0	1	
46	Hidran Kebakaran	0	0	1	1	
47	Server Komputer Lain-lain	1	0	0	1	
48	Personal Computer Unit (P.C)	4	0	12	16	
49	Lap Top	34	0	1	35	
50	Note Book	14	0	0	14	
51	Ipad/Komputer Tablet	1	0	0	1	
52	Serial Pointer	1	0	0	1	
53	Hard Disk	1	0	0	1	
54	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	0	0	2	2	
55	Printer	26	0	4	30	
56	Monitor	9	0	0	9	
57	Scanner	2	0	0	2	
58	Server	1	0	0	1	
59	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	0	0	1	
60	Meja Kerja Pejabat Eselon III	9	0	0	9	
61	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	0	0	15	
62	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	60	0	0	60	
62	Meja Rapat Pejabat Eselon III	5	0	0	5	
63	Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Eselon II	2	0	0	2	
64	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	0	0	1	
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	0	0	2	
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	0	0	11	
67	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	37	0	0	37	

No	Nama / Jenis Barang	Kondisi			Jumlah	Ket
		Baik	Sedang	Rusak Berat		
68	Kursi Rapat Pejabat Eselon III	24	0	0	24	
69	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	0	0	1	
70	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	0	0	1	
71	Lemari Buku untuk Perpustakaan	9	0	0	9	
72	Proyektor + Attachment	9	0	3	12	
73	Reel Tape Duplicator	3	0	0	3	
75	Microphone/Wireless Mic	1	0	0	1	
76	Power Amplifier	5	0	0	5	
77	Chairman/Audio Conference	1	0	0	1	
78	Microphone Table stand	15	0	3	18	
79	Conference Room System/Delegate Unit	20	0	0	20	
80	Speaker System (Conference System)	7	0	0	7	
81	Mixer Amplifier (Conference System)	2	0	0	2	
82	Control & Power Suply Unit (Conference System)	1	0	0	1	
83	Power Supply	2	0	0	2	
84	Handycam	1	0	0	1	
85	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	1	0	0	1	
86	Amplifier	1	0	0	1	
87	Microphone	1	0	0	1	
88	Loudspeaker	4	0	0	4	
89	Sound System	10	0	0	10	
90	Telephone (PABX)	1	0	0	1	
91	Pesawat Telephone	1	0	0	1	
92	Facsimile	2	0	0	2	
93	Wireless Amplifier	2	0	0	2	
94	Alat Komunikasi Sosial Lain-Lain	3	0	0	3	
95	Vacum Pump	1	0	0	1	
96	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	0	0	1	
97	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	0	1	2	

No	Nama / Jenis Barang	Kondisi			Jumlah	Ket
		Baik	Sedang	Rusak Berat		
98	Tempat Parkir	1	0	0	1	

Sumber : Bappeda dan Litbang kabupaten Tegal, 2021

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan gambaran capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran Renstra SKPD periode sebelumnya menurut indikator pelayanan SKPD atau indikator pelayanan lainnya.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Bappeda dan Litbang dapat dilihat capaian pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu melaksanakan urusan penunjang perencanaan dan penelitian pengembangan di lingkungan pemerintah Kab. Tegal.

Capaian Kinerja Bappeda dan Litbang tahun lalu berdasarkan sasarannya dibagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut :



**Tabel 2.3.**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Periode 2014-2019)**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Yang diamanatkan peraturan perundang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Target Renstra 2014-2019					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target )					
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Persentase Keselarasan antara RPJP dan RPJMD, RPJMD dan Renstra, RPJMD dan RKPD, Renstra dan Renja	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	prosentase dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	prosentase jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan ditetapkan tepat waktu	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	prosentase pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	prosentase kota kecamatan yang telah memiliki akses air bersih	Persen	-	-	50	60	70	80	100	30	55	100	100	100	60	91,67	142,9	125	100	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Yang diamankan peraturan perundang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Target Renstra 2014-2019					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target )				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
7	prosentase klaster yang difasilitasi	Persen	-	-	20	40	60	80	100	20	40	100	100	100	100	100	166,7	125	100
8	Prosentase dokumen perencanaan sosial budaya yang diimplementasikan	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	prosentase pemanfaatan hasil penelitian pengembangan dan dta penunjang perencanaan pembangunan	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	prosentase kerjasama yang termanfaatkan	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda dan Litbang kabupaten Tegal, 2021

**Tabel 2.4.**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Murni 2019-2024)**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Yang diamankan peraturan perundang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Target Renstra Murni					Realisasi Capaian Renstra	Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2020
1	Indeks Keselarasan Perencanaan pembangunan Daerah	point	-	-	95,80	96,88	97,18	97,58	98,08	93,66	97,766
2	Indeks Kelitbangan	point	-	-	78,72	83,29	87,40	91,18	94,70	58,37	99,778
3	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	persen	-	-	100,00	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Keselarasan Kebijakan Penganggaran antara prioritas kabupaten, provinsi, dan nasional	persen	-	-	100,00	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Dokumen perencanaan rumpun pemkesos	persen	-	-	97,00	98,75	98,75	98,75	98,75	100	103,09
6	persentase dokumen perencanaan rumpun ekbangtur	persen	-	-	97,00	99,17	99,17	99,17	99,17	92,5	95,361
7	tingkat kesesuaian rencana dan realisasi kegiatan	persen	-	-	85,00	86,00	87,00	92,00	95	90,92	106,96
8	tingkat capaian indikator sesuai target	persen	-	-	85,00	87,00	87,00	89,00	92	60,69	71,40
9	Persentase Produk Kelitbangan utama yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah	persen			78,79	84,85	88,57	91,89	94,87	97,56	123,82

Sumber : Bappeda dan Litbang kabupaten Tegal, 2021

**Tabel 2.5.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Perubahan 2019-2024)**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Yang diamanatkan peraturan perundang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Realisasi Capaian Renstra perubahan				
					2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks perencanaan dan Kelitbangan	point	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	76,02
2	Indeks Perencanaan keselarasan perencanaan pembangunan daerah	point	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	93,66
3	Indeks Kelitbangan	point	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	58,37
4	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan dan Kebijakan Anggaran	Persen	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100
5	Tingkat kesesuaian rencana dan realisasi pembangunan	Persen	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	90,92
6	Persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti	Persen	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	85
7	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100
8	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	92,5

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Yang diamanatkan peraturan perundang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Realisasi Capaian Renstra perubahan				
					2016	2017	2018	2019	2020
9	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	92,5
10	Persentase Dukungan Produk Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	58,37
11	Skor Inovasi	Point	-	-	N/A	N/A	N/A	185	4.035

Sumber : Bappeda dan Litbang kabupaten Tegal, 2021

Bahwa secara umum capaian kinerja pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal dapat dicapai sesuai dengan target yang direncanakan. Adapun keberhasilan tersebut dapat terwujud karena adanya berbagai macam hal yang mendukung, antara lain dikarenakan adanya komitmen yang tinggi dari aparatur Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal. Tingginya komitmen tersebut dilatarbelakangi oleh pemahaman persepsi terhadap tupoksi dan kualitas SDM yang relatif tinggi. Faktor penentu keberhasilan lainnya adalah adanya kerjasama dengan pihak lain (swasta/konsultan/perguruan tinggi) maupun lembaga teknis pemerintah pusat dan daerah yang semakin sinergis. Hal ini dipertahankan dan ditingkatkan untuk peningkatan kinerja instansi pada masa yang akan datang.

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan tahun lalu dapat diketahui sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal 2014-2019

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun 2014	Realisasi anggaran pada Tahun 2014	Persen tase realisasi anggaran pada Tahun 2014	Anggaran pada Tahun 2015	Realisasi anggaran pada Tahun 2015	Persen tase realisasi anggaran pada Tahun 2015	Anggaran pada Tahun 2016	Realisasi anggaran pada Tahun 2016	Perse ntase realisasi anggar an pada Tahun 2016	Anggaran pada Tahun 2017	Anggaran pada Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>														
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.925.000	97,5	3.000.000	2.948.000	98,27	3.000.000	2.975.000	99,17	3.000.000	3.645.000	3.000.000	1.834.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	75.225.000	59.637.949	79,28	110.000.000	80.840.414	73,49	150.000.000	99.645.451	66,43	142.820.000	125.000.000	111.500.000	1.081.670.000
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	56.000.000	55.400.000	98,93	56.000.000	55.513.000	99,13	56.000.000	53.552.000	95,63	55.000.000	62.855.000	60.000.000	59.125.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	39.800.600	99,5	35.000.000	35.000.000	100	35.000.000	35.000.000	100	35.000.000	40.000.000	35.000.000	25.939.000
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	7.500.000	100	28.700.000	28.476.000	99,22	15.000.000	14.626.500	97,51	15.000.000	19.000.000	15.000.000	14.986.000
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000	6.997.500	99,96	7.000.000	7.000.000	100	15.000.000	15.000.000	100	15.000.000	20.000.000	15.000.000	14.568.000
7	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	9.955.000	99,55	10.000.000	7.365.000	73,65	10.000.000	9.890.000	98,9	20.000.000	20.000.000	20.000.000	19.450.000
8	Penyediaan Makanan Dan Minuman	25.000.000	23.352.900	93,41	35.000.000	30.212.700	86,32	50.000.000	46.698.000	93,4	65.000.000	60.000.000	69.350.000	67.033.000
9	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	100.000.000	99.931.700	99,93	120.000.000	119.812.150	99,84	140.000.000	136.079.600	97,2	155.000.000	160.000.000	200.000.000	176.527.000
	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>													

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun 2014	Realisasi anggaran pada Tahun 2014	Persen tase realisasi anggaran pada Tahun 2014	Anggaran pada Tahun 2015	Realisasi anggaran pada Tahun 2015	Persen tase realisasi anggaran pada Tahun 2015	Anggaran pada Tahun 2016	Realisasi anggaran pada Tahun 2016	Perse ntase realisasi anggar an pada Tahun 2016	Anggaran pada Tahun 2017	Anggaran pada Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional												1.020.000.000	950.183.000
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	520.947.000	388.907.000	74,65	150.000.000	146.052.200	97,37	12.000.000	10.372.000	86,43			100.000.000	99.020.000
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	120.400.000	120.087.000	99,74	200.660.000	#####	99,54	195.300.000	189.131.000	96,84	50.000.000			
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20.000.000	19.050.000	95,25	75.000.000	57.650.000	76,87	103.000.000	96.892.000	94,07	200.000.000	165.000.000	335.000.000	331.000.000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	260.000.000	252.410.875	97,08	260.000.000	199.583.939	76,76	304.820.000	225.074.435	73,84	200.000.000	200.000.000	196.150.000	153.844.000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	20.190.000	20.190.000	100	35.000.000	34.916.000	99,76	35.000.000	29.375.000	83,93	35.000.000	40.000.000	60.000.000	59.903.000
7	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	25.000.000	24.992.600	99,97				25.000.000	20.202.300	80,81	25.000.000	25.000.000	15.000.000	10.135.000
8	Pemasangan Jaringan Telepon	50.000.000	49.835.000	99,67										
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1.545.436.000	1.415.280.217	91,58										
10	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga				112.000.000	104.023.500	92,88							
11	Penataan Lingkungan Kantor				330.000.000	323.165.000	97,93					100.000.000		
12	Penataan Interior Ruang Rapat				110.000.000	107.040.000	97,31	125.000.000	120.220.000	96,18				
13	Pengadaan Mebeleir				70.000.000	62.454.000	89,22	83.420.000	82.441.000	98,83				



No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun 2014	Realisasi anggaran pada Tahun 2014	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2014	Anggaran pada Tahun 2015	Realisasi anggaran pada Tahun 2015	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2015	Anggaran pada Tahun 2016	Realisasi anggaran pada Tahun 2016	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2016	Anggaran pada Tahun 2017	Anggaran pada Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
14	Pemasangan jaringan listrik dan air				93.500.000	89.070.500	95,26							
15	Pemeliharaan Jaringan Komunikasi										55.000.000			
16	Pengadaan Perangkat Komputer, Printer, dan Perlengkapannya												60.000.000	59.551.000
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>													
1	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	35.000.000	27.150.000	77,57	60.000.000	38.440.000	64,07	30.000.000	21.068.000	70,23	35.000.000	40.000.000	30.000.000	29.219.000
2	Maturitas SPIP												10.000.000	10.000.000
3	Penyusunan SPM												75.000.000	68.614.000
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>													
1	Penyusunan Renja Dan Lakip SKPD	10.000.000	9.999.500	100										
2	Operasional Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	35.500.000	33.920.000	95,55									51.500.000	49.380.000
2	Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD				21.240.000	19.080.000	89,83	37.000.000	36.320.000	98,16	42.000.000	47.000.000		
3	Penataan Administrasi Pengelolaan Barang SKPD				9.600.000	9.600.000	100	21.000.000	21.000.000	100				

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun 2014	Realisasi anggaran pada Tahun 2014	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2014	Anggaran pada Tahun 2015	Realisasi anggaran pada Tahun 2015	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2015	Anggaran pada Tahun 2016	Realisasi anggaran pada Tahun 2016	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2016	Anggaran pada Tahun 2017	Anggaran pada Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD				3.000.000	2.692.400	89,75	10.000.000	9.990.000	99,9	10.000.000	10.000.000	10.000.000	7.395.000
	<b>Program Pengembangan Data/ Informasi</b>													
1	Penyusunan Profile Daerah	75.000.000	58.583.800	78,11	75.000.000	65.273.500	87,03	100.000.000	98.603.600	98,6	95.000.000	90.000.000		
2	Penyusunan dan Pengumpulan Data Profil Kecamatan				100.000.000	99.525.000	99,53	100.000.000	100.000.000	100				
3	Festival Film Dokumenter Kab.Tegal				200.000.000	198.992.000	99,5							
4	Koordinasi Perencanaan Pendidikan Untuk Semua ( PUS )	65.000.000	64.996.000	99,99										
5	Pengembangan Kreatifitas Dan Inovasi Masyarakat ( Lomba Krenova )	226.158.000	202.578.900	89,57										
6	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	80.000.000	74.030.630	92,54										
7	Penyusunan dan Pengumpulan Data Indikator Makro Ekonomi	90.000.000	89.880.000	99,87										
8	Penyusunan dan Publikasi Statistik Dasar Daerah	60.000.000	60.000.000	100										

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun 2014	Realisasi anggaran pada Tahun 2014	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2014	Anggaran pada Tahun 2015	Realisasi anggaran pada Tahun 2015	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2015	Anggaran pada Tahun 2016	Realisasi anggaran pada Tahun 2016	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2016	Anggaran pada Tahun 2017	Anggaran pada Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
9	Penyusunan Film Dokumenter Kab.Tegal	375.000.000	354.478.000	94,53				75.000.000	70.261.000	93,68				
10	Penyusunan Sistem Informasi dan Pemetaan Profile Daerah Irigasi	125.000.000	119.958.000	95,97										
11	Koordinasi Pengelolaan Data dan Forum Data Kabupaten Tegal	100.000.000	99.189.589	99,19	140.000.000	139.842.638	99,89	75.000.000	74.729.626	99,64	90.000.000	80.000.000	75.000.000	74.993.000
12	Penyusunan Dan Pengumpulan Data NTP	35.000.000	35.000.000	100										
13	Pembuatan audio visual data informasi pembangunan	50.000.000	48.527.000	97,05										
14	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Perumahan.				160.000.000	150.204.500	93,88							
15	Survey Pemetaan Batas Desa di Kabupaten Tegal				300.000.000	293.826.604	97,94							
16	Penyusunan Master Plan TIK Untuk Pembangunan							250.000.000	239.974.678	95,99				
17	Evaluasi Perda RPJMD 2014-2019							150.000.000	149.641.500	99,76				
18	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah										138.000.000	100.000.000	70.000.000	69.632.000
19	Pengembangan Sistem Pengendalian											70.000.000	50.000.000	34.350.000

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun 2014	Realisasi anggaran pada Tahun 2014	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2014	Anggaran pada Tahun 2015	Realisasi anggaran pada Tahun 2015	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2015	Anggaran pada Tahun 2016	Realisasi anggaran pada Tahun 2016	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2016	Anggaran pada Tahun 2017	Anggaran pada Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
	Pembangunan Daerah													
20	Pengembangan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan											70.000.000		
21	Survei dan Pengembangan E-gov												152.000.000	135.523.000
	<b>Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah</b>													
1	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan statistik daerah				80.000.000	79.615.054	99,52	100.000.000	100.000.000	100				
2	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB				100.000.000	99.993.188	99,99	90.000.000	90.000.000	100				
	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>													
1	Penyelenggaraan Pameran Investasi				12.000.000	12.000.000	100	12.000.000	12.000.000	100	15.000.000,00	15.000.000		
	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>													
1	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga	48.800.000	44.150.300	90,47	75.000.000	74.945.000	99,93	100.000.000	97.430.950	97,43				

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun 2014	Realisasi anggaran pada Tahun 2014	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2014	Anggaran pada Tahun 2015	Realisasi anggaran pada Tahun 2015	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2015	Anggaran pada Tahun 2016	Realisasi anggaran pada Tahun 2016	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2016	Anggaran pada Tahun 2017	Anggaran pada Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
2	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	47.000.000	46.455.000	98,84	100.000.000	97.498.470	97,5	150.000.000	131.623.598	87,75				
2	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga Melalui DRD Kabupaten Tegal	50.000.000	47.560.000	95,12	75.000.000	70.379.602	93,84							
3	Penyelenggaraan Pameran Inovasi				40.000.000	39.097.264	97,74	40.000.000	39.574.821	98,94	50.000.000	50.000.000	45.000.000	42.909.000
3	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan				40.000.000	39.672.800	99,18	75.000.000	72.855.500	97,14	70.000.000	70.000.000	50.000.000	46.703.000
4	Koordinasi Fasilitasi Pendirian Perguruan Tinggi Negeri di Kabupaten Tegal							150.000.000	147.967.200	98,64				
4	Fasilitasi Penyelenggaraan KKN Perguruan Tinggi										100.000.000	100.000.000	140.000.000	128.528.000
5	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah										75.000.000	75.000.000	50.000.000	44.055.000
6	Koordinasi Pengembangan Pemuda Wirausaha												930.000.000	855.698.000
	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh</b>													

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun 2014	Realisasi anggaran pada Tahun 2014	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2014	Anggaran pada Tahun 2015	Realisasi anggaran pada Tahun 2015	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2015	Anggaran pada Tahun 2016	Realisasi anggaran pada Tahun 2016	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2016	Anggaran pada Tahun 2017	Anggaran pada Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
1	Koordinasi Perencanaan Perekonomian Dan Pengembangan Infrastruktur	110.000.000	109.633.900	99,67										
2	Koordinasi perencanaan pengembangan infrastruktur											100.000.000	125.000.000	119.838.000
3	Penyusunan Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS)	64.596.000	60.832.900	94,17										
4	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur				120.000.000	119.045.759	99,2	100.000.000	99.939.800	99,94	100.000.000			
5	Study Geologi Kawasan Kalibakung Balapulang dan Gunung Anjing Bojong							200.000.000	199.968.302	99,98				
6	Pendampingan pengembangan wilayah strategis							90.000.000	89.677.500	99,64	140.000.000			
7	Koordinasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)										50.000.000	50.000.000	50.000.000	46.696.000
8	Pendampingan Pengembangan Kawasan Wisata Semedo											140.000.000		
	<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota</b>													

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun 2014	Realisasi anggaran pada Tahun 2014	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2014	Anggaran pada Tahun 2015	Realisasi anggaran pada Tahun 2015	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2015	Anggaran pada Tahun 2016	Realisasi anggaran pada Tahun 2016	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2016	Anggaran pada Tahun 2017	Anggaran pada Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
	<b>Menengah Dan Besar</b>													
1	Koordinasi Perencanaan Ampl ( Air Minum Penyehatan Lingkungan )	65.001.000	60.408.245	92,93										
2	Pendampingan Pamsimas HIK	20.000.000	-	-										
3	Koordinasi Perencanaan Air Minum , drainase dan sanitasi perkotaan				100.000.000	94.369.889	94,37	50.000.000	47.146.000	94,29	50.000.000	50.000.000	90.000.000	84.451.000
4	Pendampingan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin (Sanimas)										35.000.000	40.000.000		
5	Pendampingan Penyediaan Sarana Air Bersih (PAMSIMAS)										25.000.000	25.000.000		
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>													
1	Koordinasi Penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah				160.000.000	157.152.380	98,22	125.000.000	120.060.734	96,05				
2	Penyusunan rencana dan penetapan Renja-SKPD				5.000.000	5.000.000	100	10.000.000	9.827.000	98,27	10.000.000	10.000.000	15.000.000	12.712.000

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun 2014	Realisasi anggaran pada Tahun 2014	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2014	Anggaran pada Tahun 2015	Realisasi anggaran pada Tahun 2015	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2015	Anggaran pada Tahun 2016	Realisasi anggaran pada Tahun 2016	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2016	Anggaran pada Tahun 2017	Anggaran pada Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
3	Penyusunan rancangan dan penetapan RKPD				260.000.000	254.777.500	97,99	122.000.500	121.844.450	99,87	160.000.000	160.000.000		
4	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program Dan Kebijakan Layanan Publik	100.000.000	75.248.500	75,25	125.000.000	103.370.000	82,7	200.000.000	196.584.500	98,29	200.000.000	190.000.000	140.000.000	126.942.000
5	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	250.000.000	247.820.345	99,13				158.500.000	156.951.400	99,02	220.000.000	250.000.000	335.000.000	331.577.000
6	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	110.000.000	106.787.600	97,08	195.000.000	178.240.390	91,41	150.000.000	145.744.235	97,16	185.000.000	185.000.000		
7	Penyusunan rancangan dan penetapan KUA dan PPAS	115.000.000	113.895.500	99,04	100.000.000	99.686.400	99,69	150.000.000	149.181.000	99,45	160.000.000	160.000.000	150.000.000	147.598.000
8	Penyusunan Rancangan KUPA Dan PPAS Perubahan				50.000.000	49.103.500	98,21							
9	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah				115.000.000	113.931.000	99,07	119.500.000	117.728.500	98,52	165.000.000	115.000.000	105.000.000	94.712.000
10	Koordinasi Perencanaan Dan Penganggaran	100.000.000	99.113.450	99,11										
11	Penyusunan rancangan dan penetapan perubahan RKPD				50.000.000	49.233.000	98,47	50.000.000	48.541.500	97,08			150.000.000	143.421.000
12	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	65.000.000	54.327.600	83,58										
13	Penyusunan Rencana Tata Ruang	750.000.000	705.878.800	94,12										



No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun 2014	Realisasi anggaran pada Tahun 2014	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2014	Anggaran pada Tahun 2015	Realisasi anggaran pada Tahun 2015	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2015	Anggaran pada Tahun 2016	Realisasi anggaran pada Tahun 2016	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2016	Anggaran pada Tahun 2017	Anggaran pada Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
14	Penyusunan DED Gedung Kantor	75.000.000	74.485.500	99,31										
15	Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RPJMD	80.000.000	69.758.000	87,2										
16	Koordinasi Pengendalian Dan Operasional Kegiatan (POK)	160.000.000	155.321.700	97,08							150.000.000	155.000.000		
17	Review dan penyempurnaan Peta RDTR 5 kec	75.000.000	62.787.800	83,72										
18	Kajian Penataan Toko Modern	125.000.000	112.205.000	89,76										
19	Review Perencanaan Jalan Lingkar Barat Kota Slawi	100.000.000	97.745.300	97,75										
20	Penyusunan RPJMD 2014-2019	275.000.000	274.180.900	99,7										
21	Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD 2014-2019	75.000.000	73.977.000	98,64									75.000.000	68.223.000
22	Fasilitasi Penyusunan Renja SKPD	65.000.000	64.009.500	98,48	50.000.000	49.743.100	99,49	50.000.000	50.508.600	101,02	60.000.000	60.000.000	60.000.000	56.562.000
23	Evaluasi RKPD	62.654.000	56.052.600	89,46										
24	Koordinasi penelitian dan pengembangan	50.000.000	49.669.931	99,34										
25	Sosialisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah				50.000.000	49.122.400	98,24							
26	Review DED sub terminal agribisnis				57.500.000	55.502.750	96,53							

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun 2014	Realisasi anggaran pada Tahun 2014	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2014	Anggaran pada Tahun 2015	Realisasi anggaran pada Tahun 2015	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2015	Anggaran pada Tahun 2016	Realisasi anggaran pada Tahun 2016	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2016	Anggaran pada Tahun 2017	Anggaran pada Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
27	Penyusunan redesain DED pembangunan gedung kecamatan				80.000.000	43.654.000	54,57	34.369.500	34.369.500	100				
28	Kajian geologi pembangunan jalan sigedong sawangan				60.000.000	58.832.000	98,05							
29	Koordinator tim evaluasi percepatan penyerapan anggaran (TEPPA )							50.000.000	49.631.500	99,26	60.000.000	60.000.000	60.000.000	55.347.000
30	Study Kelayakan Pemanfaatan Rest Area Klonegan							50.000.000	46.594.500	93,19				
31	Penyusunan Detail Engineering Design (DED)										125.000.000			
32	Review Renstra SKPD										10.000.000			
33	Fasilitasi Review Penyusunan Renstra SKPD										90.000.000			
34	Identifikasi Potensi Kearifan Lokal Pertanian										150.000.000			
35	Penyusunan Raperda Perubahan RPJMD Tahun 2014-2019										11.320.000			
36	Penyusunan LKPJ Bupati										130.000.000		150.000.000	146.710.000
37	Penyusunan LKPJ Bupati Akhir Tahun (AMJ)											225.000.000		
38	Penyusunan rancangan teknokratik										50.000.000			

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun 2014	Realisasi anggaran pada Tahun 2014	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2014	Anggaran pada Tahun 2015	Realisasi anggaran pada Tahun 2015	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2015	Anggaran pada Tahun 2016	Realisasi anggaran pada Tahun 2016	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2016	Anggaran pada Tahun 2017	Anggaran pada Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
	RPJMD 2019-2024													
39	Peningkatan kapasitas perencanaan											300.000.000		
40	Penyusunan Rancangan awal sementara RPJMD 2019-2024											70.000.000	350.000.000	347.142.000
41	Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan APBD												130.000.000	123.574.000
42	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD												13.300.000	127.471.000
43	Penyusunan Renstra SKPD												25.000.000	24.000.000
44	Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran RPJMD 2014-2019												50.000.000	44.412.000
45	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) (Banprov)												840.000.000	790.806.000
	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>													
1	Gangguan akibat kurang yodium [ GAKY] [Bantuan Prpinsi ]							70.000.000	69.480.000	99,26				
	<b>Program Perencanaan</b>													

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun 2014	Realisasi anggaran pada Tahun 2014	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2014	Anggaran pada Tahun 2015	Realisasi anggaran pada Tahun 2015	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2015	Anggaran pada Tahun 2016	Realisasi anggaran pada Tahun 2016	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2016	Anggaran pada Tahun 2017	Anggaran pada Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
	<b>Pembangunan Ekonomi</b>													
1	Koordinasi Daya Saing Daerah	175.000.000	173.335.130	99,05	200.000.000	197.712.397	98,86	150.000.000	148.460.500	98,97	160.000.000	175.000.000		
2	Koordinasi pengendalian inflasi daerah				50.000.000	43.971.000	87,94	50.000.000	49.526.500	99,05	50.000.000	50.000.000	50.000.000	49,503.000
3	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi							75.000.000	74.173.145	98,9	80.000.000	80.000.000	80.000.000	77.740.000
4	Analisis Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pertanian Pendukung Ketahanan Pangan							150.000.000	147.233.894	98,16				
5	Studi ekonomi makro daerah											100.000.000		
6	Studi pendapatan daerah											200.000.000		
7	Studi penyusunan tabel input - output (IO)											500.000.000		
	<b>Program Perencanaan Sosial Dan Budaya</b>													
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya	180.000.000	179.990.000	99,99	200.000.000	199.969.000	99,98	175.000.000	174.992.000	100				
2	Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah [ TKPKD]				200.000.000	196.918.774	98,46							

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun 2014	Realisasi anggaran pada Tahun 2014	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2014	Anggaran pada Tahun 2015	Realisasi anggaran pada Tahun 2015	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2015	Anggaran pada Tahun 2016	Realisasi anggaran pada Tahun 2016	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2016	Anggaran pada Tahun 2017	Anggaran pada Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
3	Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Untuk Semua [ PUS]				100.000.000	99.959.000	99,96	100.000.000	99.759.100	99,76	65.000.000	70.000.000		
4	Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan							175.000.000	161.415.150	92,24	175.000.000	175.000.000		
5	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial										175.000.000	170.000.000	170.000.000	163.621.000
6	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan										100.000.000	90.000.000	75.000.000	67.410.000
7	Koordinasi Penanggulangan GAKY (Bantuan Propinsi)										100.000.000	65.000.000		
8	Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan TIK Untuk Pembangunan										230.000.000			
	<b>'Program Penataan peraturan Perundang-Undangan</b>													
1	Penyusunan Raperda tentang prosedur perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kab.Tegal				75.000.000	73.961.900	98,62							

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun 2014	Realisasi anggaran pada Tahun 2014	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2014	Anggaran pada Tahun 2015	Realisasi anggaran pada Tahun 2015	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2015	Anggaran pada Tahun 2016	Realisasi anggaran pada Tahun 2016	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2016	Anggaran pada Tahun 2017	Anggaran pada Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
	<b>Program Peningkatan layanan Publik</b>													
1	Penerbitan jurnal majalah, dan terbitan berkala lainnya.				80.000.000	77.571.500	96,96	80.000.000	78.064.000	97,58	75.000.000	75.000.000		
	<b>Program Pengembangan Komunikasi Dan Media Masa</b>													
1	Dukungan Pengembangan Telecenter	25.000.000	24.605.000	98,42										
	<b>Program Kerjasama Informasi dan Mas Media</b>													
1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah				20.000.000	19.121.000	95,61	25.000.000	22.880.273	91,52	30.000.000	30.000.000		
	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>													
1	Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan	130.000.000	128.529.500	98,87										

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun 2014	Realisasi anggaran pada Tahun 2014	Persen tase realisasi anggaran pada Tahun 2014	Anggaran pada Tahun 2015	Realisasi anggaran pada Tahun 2015	Persen tase realisasi anggaran pada Tahun 2015	Anggaran pada Tahun 2016	Realisasi anggaran pada Tahun 2016	Perse ntrealisasi anggar an pada Tahun 2016	Anggaran pada Tahun 2017	Anggaran pada Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b>													
1	Pengadaan Jasa Konsultasi Manajemen Pendamping PDPM	150.000.000	146.882.400	97,92										
	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>													
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan				750.000.000	722.493.060	96,33	525.000.000	478.410.820	91,13				
2	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang				75.000.000	70.568.000	94,09							
3	Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang							54.700.000	54.005.000	98,73				
4	Penyusunan Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)							200.000.000	194.768.246	97,38				
5	Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW										70.000.000			
6	Revisi Perda RTRW										200.000.000			
7	Asesment Peta RDTR se Kabupaten Tegal										70.000.000			
8	Penyusunan Mater Plan Minipolitan										177.000.000			
9	Penyusunan Perda Refisi RTRW										125.000.000			

No	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun 2014	Realisasi anggaran pada Tahun 2014	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2014	Anggaran pada Tahun 2015	Realisasi anggaran pada Tahun 2015	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2015	Anggaran pada Tahun 2016	Realisasi anggaran pada Tahun 2016	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2016	Anggaran pada Tahun 2017	Anggaran pada Tahun 2018	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
10	Penyusunan masterplan penataan kawasan di Kab.Tegal										200.000.000			
11	Revisi Tata Ruang (Finalisasi Perda)											90.000.000		
12	Review Peta RDTR											210.000.000		
13	KLHS Perda RDTR											990.000.000		
	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>													
1	Pembuatan penegasan batas desa							100.000.000	99.995.000	100				
2	Penuntasan Penegasan Batas Desa Kabupaten Tegal										400.000.000			
3	Koordinasi Penataan Ruang Daerah							110.000.000	108.764.500	98,88	100.000.000	90.000.000		
	<b>Program Peningkatan Kemampuan teknologi industry</b>													
1	Pengembangan kreatifitas dan kemampuan inovasi teknologi masyarakat				175.000.000	166.610.900	95,21	160.000.000	159.776.622	99,86	160.000.000	160.000.000		
<b>J U M L A H</b>		<b>7.945.407.000</b>	<b>7.390.192.161</b>	<b>93,01</b>	<b>6.934.200.000</b>	<b>6.571.162.022</b>	<b>94,76</b>	<b>6.831.610.000</b>	<b>6.506.218.530</b>	<b>95,24</b>	<b>6.869.140.000</b>	<b>7.522.500.000</b>	<b>7.341.800.000</b>	<b>7.922.732.000</b>

Sumber : Bappeda dan Litbang kabupaten Tegal, 2021



## 2.3.1 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

### 2.3.1.1 Perencanaan

#### 1) Perencanaan Penganggaran Pogram

Perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, top-down & bottom-up. Perencanaan dan penganggaran program adalah untuk memastikan penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten Tegal yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sesuai tahapan. Adapun pencapaian penyusunan dokumen perencanaan sesuai tahapan mulai tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 seperti tabel dibawah, dan diharapkan 5 tahun kedepan dengan target 100% dapat diwujudkan.

**Tabel 2.7**

**Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program Disusun Tepat Waktu Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan (%)	100	100	100	100	100

*Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2021*

Berdasarkan data diatas maka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tegal telah sesuai dengan

ketentuan perundangan yang berlaku baik tahapan maupun waktunya. Hal ini perlu dipertahankan dan secara kualitas masih diperlukan adanya peningkatan di masa mendatang.

## 2) Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

Perencanaan pemerintahan dan kesejahteraan sosial adalah untuk menghasilkan keselarasan dokumen perencanaan daerah yaitu RKPD rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial dengan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renja OPD Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui koordinasi stakeholder rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan. Pencapaian keselarasan dokumen perencanaan daerah rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial dengan dokumen perangkat daerah rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial sesuai tahapan dalam tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.8**

**Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun  
Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Keselarasan Dokumen Perencanaan Pemkesos dengan dokumen perencanaan OPD rumpun Pemkesos (%)	95	96	96	97	97

*Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021*

Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial dengan dokumen perencanaan OPD rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial belum mencapai 100% dikarenakan masih adanya kegiatan inisiatif dari OPD yang muncul setelah penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai akibat adanya dinamika dalam pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan sosial.

### 3) **Perencanaan Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur**

Perencanaan yang baik dan selaras antara dokumen perencanaan daerah yaitu RKPD dan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renja OPD di bidang perekonomian dan infrastruktur dapat menghasilkan kondisi perekonomian dan infrastruktur daerah yang baik sesuai dengan harapan masyarakat. Perencanaan Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur adalah untuk menghasilkan keselarasan dokumen RKPD rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur dengan Renja OPD pada rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur. Dengan keselarasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil pembangunan ekonomi dan kondisi infrastruktur di kabupaten Tegal. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur dengan dokumen perangkat daerah rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur sesuai tahapan dapat dilihat dalam tabel dibawah.

**Tabel 2.9**

**Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Keselarasan Dokumen Perencanaan Ekbangtur dengan dokumen perencanaan OPD rumpun Ekbangtur (%)	94	94	95	96	96

*Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2021*

Keselarasan dokumen perencanaan daerah rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur dengan dokumen perencanaan OPD rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur belum dapat mencapai 100% dikarenakan terdapat perbedaan dalam penerapan detail teknis kegiatan khususnya yang menyangkut konstruksi bangunan.

#### 4) Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan adalah untuk mengendalikan kesesuaian rencana dan realisasi kegiatan dan mengevaluasi capaian indikator pembangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui pengendalian operasional kegiatan, monitoring dan evaluasi kegiatan serta evaluasi kinerja pembangunan. Hasil pencapaian kesesuaian rencana dan realisasi kegiatan serta capaian indikator pembangunan sesuai target dapat digambarkan sebagaimana tabel dibawah.

**Tabel 2.10**  
**Tingkat Kesesuaian Rencana dan Realisasi Kegiatan**  
**Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rata – Rata Deviasi Capaian Kinerja Fisik (%)	20,88	17,21	13,75	15,05	3,80
2.	Rata – Rata Deviasi Capaian Kinerja Keuangan (%)	34,80	28,59	22,73	21,86	11,63
3.	Rata – Rata Deviasi (%)	27,84	22,90	18,24	18,46	7,72
4	Tingkat Kesesuaian Rencana dan Realisasi Kegiatan (%)	72,16	77,1	81,76	81,54	92,28

*Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2021*

Tingkat kesesuaian rencana dan Realisasi Kegiatan dicerminkan dengan adanya rata-rata deviasi kegiatan yang dicapai. Semakin kecil deviasi antara rencana dan realisasi kegiatan semakin baik kinerja kegiatan pembangunan. Berdasarkan Tabel diatas, tingkat kesesuaian antara rencana dan realiasi kegiatan dalam 5 tahun terakhir semakin meningkat. Namun dengan rata-rata deviasi kegiatan masih diatas 18% masih perlu upaya keras untuk mencapai deviasi dibawah 10%. Rata- rata deviasi kegiatan tahun 2015 masih tinggi disebabkan realisasi fisik dan keuangan tahun 2015 hanya mencapai 69,65 %

karena banyak kegiatan infrastruktur strategis yang tidak terlaksana atau tidak selesai.

**Tabel 2.11**  
**Tingkat Capaian Indikator Pembangunan Sesuai Target**  
**Tahun 2015-2019**

No	Indikator Pembangunan	Kondisi Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Indikator sasaran tercapai	123	132	159	178	161
	Jumlah Indikator sasaran	200	200	200	200	200
	<i>Tingkat Capaian Indikator Tercapai (%)</i>	61,50	66,00	79,50	89,00	83,85
2.	Jumlah Indikator Program Tinggi/Sangat Tinggi	323	335	357	402	444
	Jumlah Indikator Program	518	518	518	518	518
	<i>Tingkat CapaianTinggi/ Sangat Tinggi (%)</i>	62,36	64,67	68,92	77,61	85,71
3.	Jumlah IKD tercapai	153	177	196	253	219
	Jumlah IKD	315	307	307	307	307
	<i>Tingkat Capaian Indikator Tercapai (%)</i>	48,57	57,65	63,84	82,41	71,33
4.	<i>Tingkat Capaian Indikator Sesuai Target (%)</i>	57,48	62,78	70,75	83,01	80,30

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2021

Tingkat capaian indikator pembangunan sesuai target dapat dijadikan ukuran kinerja pembangunan yang dicerminkan dengan rata-rata indikator pembangunan yang tercapai baik indikator sasaran, indikator program maupun indikator kinerja daerah. Dengan tingkat ketercapaian > 80% menunjukkan kinerja yang cukup baik dan harus dapat dipertahankan serta ditingkatkan di masa mendatang.

### 2.3.1.2 Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penelitian dan pengembangan terintegrasi dengan fungsi perencanaan pembangunan. Hal tersebut dimaksudkan agar hasil-hasil dari penelitian dan pengembangan dapat dimanfaatkan dalam

perencanaan pembangunan. Berdasarkan upaya yang telah berjalan maka hasil kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah dari tahun 2014 sampai dengan 2018 semakin meningkat sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 2.12**

**Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Tahun 2015 – 2019**

Indikator	Realisasa Capaian				
	2015	2016	2017	2018	2019
Hasil kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	90,24	90,65	91,18	92,21	93,76

*Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2021.*

Pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dimasa mendatang. Sistem pendataan dan pelaporan kelitbangan yang belum terintegrasi dalam satu lembaga dimana masing-masing lembaga/instansi yang melakukan fungsi kelitbangan belum sepenuhnya melakukan koordinasi dan sinergi menjadi salah satu kendala yang perlu dibenahi. Guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yangmendedepankan proses kelitbangan dan IPTEK, maka pengembangan dan penerapannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal**

Bappeda Kabupaten Tegal dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda dan Litbang kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Aturan yang mengatur penyusunan dokumen perencanaan dinamikanya tinggi sering terjadi perubahan;
2. Prioritas pemanfaatan anggaran belum didasarkan pada prioritas kebutuhan pembangunan yang strategis;
3. Alokasi anggaran belum sepenuhnya berbasis indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Bappeda adalah sebagai berikut:

1. SDM Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal cukup mumpuni untuk menyesuaikan perubahan dinamika regulasi;
2. Memanfaatkan sumber sumber pendapatan diluar APBD untuk mendukung pembangunan;
3. Efektifitas pengendalian evaluasi pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan hingga hasil.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN TEGAL**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda dan Litbang**

Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024. Oleh karena itu isu strategis pada Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 berkaitan erat dengan isu-isu Perubahan RPJMD utamanya peran Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal dalam Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat. Berkenaan hal tersebut Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada baik sumberdaya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal melaksanakan 2 Fungsi penunjang yakni Fungsi Perencanaan dan Fungsi Penelitian dan Pengembangan, sehingga berdasarkan peraturan daerah tersebut Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal 2019-2024 perlu dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan kewenangan dan penajaman strategi terutama yang terkait dengan fungsi penelitian dan pengembangan karena memuat inovasi kelitbangan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan strategis dalam bidang perencanaan dan kelitbangan, capaian kinerja pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka



diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal yaitu :

**Tabel 3.1**

**Pemetaan Permasalahan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal**

<b>ISU RPJMD</b>	<b>ISU RENSTRA</b>	<b>Pokok Permasalahan Renstra</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Akar Masalah</b>
Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi	Integrasi Perencanaan dan Kelitbangan sebagai Akselerator Pencapaian Target Pembangunan	Kualitas Perencanaan Pembangunan berbasis mitigasi risiko belum maksimal	Belum maksimalnya kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan dan sinkronisasi penganggaran	Banyaknya muatan materi yang harus diakomodasi pada setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang berbatas waktu
			Manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal OPD berbasis mitigasi risiko belum efektif	Hasil koordinasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan berbasis mitigasi risiko belum maksimal
			Keselarasan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah belum maksimal	Hasil koordinasi perencanaan sektoral belum maksimal
		Dukungan kelitbangan dalam pembangunan masih rendah	Pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan inovasi yang dapat mendukung secara langsung pelaksanaan berbagai sektor pembangunan daerah belum optimal	Hasil kelitbangan belum optimal dan selaras dengan pemecahan isu pembangunan yang dibutuhkan

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2021.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”**.

Arti Visi:

Sejahtera	Masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan.
Mandiri	Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan memantapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri dan .
Unggul	Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.
Berbudaya	Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memegang teguh nilai-nilai tradisi, kearifan dan budaya lokal.
Berakhlak mulia	Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan.

Visi kabupaten Tegal tersebut diwujudkan dalam misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.

2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Adapun Bappeda dan Litbang sesuai dengan tupoksinya bertugas dalam mendukung pencapaian Misi 1 yaitu **Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.**

Makna yang terkandung dalam misi ini adalah bagaimana mewujudkan aparatur birokrasi yang profesional, dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kualitas manajemen kinerja, meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah. Sehingga yang penting dilakukan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal, penyediaan layanan pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), peningkatan manajemen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, peningkatan keselarasan perencanaan pembangunan daerah, peningkatan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah, peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan profesionalitas aparatur sipil negara (ASN) dan penerapan sistem merit.

Bappeda dan Litbang selaku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan

pembangunan daerah, dan penelitian pengembangan diharapkan mampu menyusun program pembangunan daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Bappeda dan Litbang juga mendukung Misi 3 yaitu **Membangun Perekonomian Rakyat yang kokoh, Maju Berkeadilan dan Berkelanjutan.**

Makna yang terkandung dalam misi ini adalah mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan dan pariwisata dengan meningkatnya produktifitas sektor pertanian, meningkatnya sektor produktifitas di sektor industri pengolahan, meningkatnya kunjungan wisatawan, meningkatnya produktifitas di sektor perdagangan. Sehingga penting untuk melakukan transformasi dan hilirasi sektor pertanian yang berbasis inovasi dan perkembangan teknologi, pemulihan sektor industri dengan serangkaian fasilitasi/ stimulus usaha industri, pengembangan obyek dan destinasi wisata baik yang sudah ada maupun menciptakan obyek dan destinasi wisata baru, transformasi ekonomi digital pada aktifitas perdagangan untuk memperbaiki jejaring supply-demand.

### 3.3. Telaah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, telah ditentukan tujuan dan sasarannya sebagaimana terdapat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Tujuan, Sasaran dan Strategi Bappeda Provinsi Jawa Tengah**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Meningkatnya Keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran pembangunan daerah	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan pusat, kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan dengan fokus pada lingkup bidang kerja

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Penyediaan dan penyajian data pendukung perencanaan pembangunan
		Implementasi Hasil Kelitbangan Iptekin sesuai dengan program perencanaan pembangunan daerah	Mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan kualitas dan pemantapan implementasi kelitbangan iptekin dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penguatan dan penciptaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
	Meningkatkan tata kelola organisasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah	Meningkatnya kualitas pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Tengah	meningkatkan kebutuhan perkantoran, kepegawaian dan keuangan administrasi pelayanan
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Provinsi Jawa Tengah	meningkatnya perencanaan dan evaluasi kinerja

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018-2023

Sebagaimana tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan dengan adanya tugas dan fungsi pelayanan Bappeda dan Litbang Kab. Tegal dalam membantu bupati melaksanakan pemerintahan yang baik maka Bappeda dan Litbang Kab. Tegal ikut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Jawa Tengah melalui tugas yang terdiri dari perencanaan, pengendalian, monitoring dan koordinasi serta penelitian kelitbangan.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal memiliki tugas pokok penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian pengembangan serta data dan informasi perencanaan pembangunan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal tidak memiliki program dan kegiatan yang

terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

### **3.5. Penentuan Isu-isu strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Tegal dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan.

Penentuan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal harus memperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena berdampak pada pencapaian tujuan. Isu strategis apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan isu strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal yaitu Integrasi Perencanaan dan Kelitbangan sebagai Akselerator Pencapaian Target Pembangunan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, maka Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang perencanaan pembangunan dan penelitian, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan, menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan dan memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

#### **4. 1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan Perubahan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal adalah turunan dari pernyataan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang ingin dicapai dalam waktu 3 (tiga) tahun kedepan yang harus diwujudkan dan dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal sesuai tugas pokok dan fungsinya, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal.

Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal Tahun 2019- 2024 mengubah tujuan dan sasaran jangka menengah. Adapun

perubahan tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal dalam kurun waktu Tahun 2019-2024 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal dimana misi yang menjadi urusan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal adalah misi pertama yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif melayani rakyat, juga mendukung Misi 3 yaitu Membangun Perekonomian Rakyat yang kokoh, Maju Berkeadilan dan Berkelanjutan, maka Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal menetapkan perubahan tujuan jangka menengahnya yaitu **“Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Kelitbangan”**.

#### **4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Sasaran adalah adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Perubahan sasaran yang ingin dicapai oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah ;
2. Meningkatnya kualitas kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Bappeda dan Litbang Tahun 2019-2024 dapat digambarkan sebagaimana Tabel Berikut :



**Tabel 4.1****Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra 2019-2024 Murni)**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah		Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	point	95,80	96,88	97,18	97,18	98,08
		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	point	96,58	96,88	97,18	97,18	98,08
2	Meningkatkan pemanfaatan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah		Indeks kelitbangan dan Pengelolaan Data	point	58,50	83,29	87,40	91,18	94,70
		Meningkatnya pemanfaatan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Indeks kelitbangan dan Pengelolaan Data	point	58,50	83,29	87,40	91,18	94,70

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021.

**Tabel 4.2****Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra 2019-2024 Perubahan)**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
						2022	2023	2024
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Kelitbangan		Indeks Perencanaan dan Kelitbangan	Point	87,5	88,76	90,61	92,37
2		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Point	90,58	91,68	92,76	98,08
3		Meningkatnya kualitas Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kelitbangan	Point	87,40	91,18	94,70	94,7
4		Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dalam dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Perumusan strategi merupakan penjabaran langkah aksi dari indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditentukan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2019-2024, telah dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Bappeda dan Litbang sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menunjang urusan perencanaan bertugas dalam mendukung pencapaian Misi ke-1 yaitu **“Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan efektif melayani rakyat”**, dan misi ke-3 yaitu **“Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan”**. Adapun Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan Bappeda dan Litbang dalam menunjang pencapaian misi 1 dan misi 3 juga didasarkan pada isu-isu strategis dan permasalahan yang ada. Strategi ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan yang selanjutnya dijabarkan melalui kebijakan sehingga pencapaian tujuan lebih terarah dan tepat sasaran.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan Bappeda dan Litbang telah disusun rumusan tujuan, sasaran dan strategi yang akan dilakukan sebagaimana tabel 5 berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal**

VISI RPJMD:	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia		
MISI RPJMD:	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra
Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Kelitbangan	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Kelitbangan dalam Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas proses dan integrasi perencanaan dan penganggaran
			Penguatan pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan
			Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan perangkat daerah
	Difusi produk kelitbangan dalam pembangunan yang inovatif		
	Meningkatnya kualitas Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah		

Sumber : Bappeda dan Litbang kabupaten Tegal, 2021

## **5.2 Pengarusutamaan dalam pembangunan**

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappeda dan Litbang melakukan pengarusutamaan atau mainstreaming terhadap isu-isu strategis yaitu :

- a. Pengarusutamaan Gender (PUG) yang ditindaklanjuti dalam bentuk Gender Analisis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional Renstra dan Renja.
- b. melakukan pengarusutamaan penanggulangan masalah gizi (stunting) baik yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada kelompok sasaran penanggulangan masalah gizi/stunting yaitu remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan/nifas, ibu menyusui, ibu yang memiliki baduta dan balita) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi 2 konvergensi stunting sebagai penjabaran renstra dan renja
- c. inovasi pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah
- d. pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah
- e. pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain, difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah.

## **5.3. Kebijakan**

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Kebijakan diartikan sebagai arahan tindakan

operasional dari pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Adapun arah kebijakan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal selama 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.2**  
**Fokus Kebijakan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal 2020-2021**

No	Arah Kebijakan	
	2020	2021
1	2	3
1	Peningkatan jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	Peningkatan jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu
2	Peningkatan jumlah dokumen perencanaan yang kebijakan anggarannya selaras antara prioritas kabupaten, provinsi dan nasional	Peningkatan jumlah dokumen perencanaan yang kebijakan anggarannya selaras antara prioritas kabupaten, provinsi dan nasional
3	Peningkatan keselarasan dokumen perencanaan rumpun pemerintahan dan pembangunan manusia	Peningkatan keselarasan dokumen perencanaan rumpun pemerintahan dan pembangunan manusia
4	Peningkatan Prosentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Rumpun perekonomian dan SDA, Rumpun Infrastruktur dan Kewilayahan	Peningkatan Prosentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Rumpun Perekonomian dan SDA dan Rumpun Infrastruktur dan Kewilayahan
5	Peningkatan ketercapaian Rencana dan Realisasi kegiatan	Peningkatan ketercapaian Rencana dan Realisasi kegiatan
6	Peningkatan Capaian Indikator pembangunan sesuai Target	Peningkatan Capaian Indikator pembangunan sesuai Target
7	Peningkatan angka pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan angka pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah
8	Peningkatan angka pemanfaatan data pokok/data sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan angka pemanfaatan data pokok/data sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah

Sumber : Bappeda dan Litbang kabupaten Tegal, 2021

**Tabel 5.3****Fokus Kebijakan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal 2022-2024 (Perubahan Renstra)**

No	Fokus Kebijakan		
	2022	2023	2024
1	2	3	4
1	Penyediaan juknis/pedoman penyusunan dokumen perencanaan/penganggaran daerah dan perangkat daerah	Penyediaan juknis/pedoman penyusunan dokumen perencanaan/penganggaran daerah dan perangkat daerah	Penyediaan juknis/pedoman penyusunan dokumen perencanaan/penganggaran daerah dan perangkat daerah
2	Optimalisasi sistem informasi pendukung penyusunan perencanaan dan penganggaran	Optimalisasi sistem informasi pendukung penyusunan perencanaan dan penganggaran	Optimalisasi sistem informasi pendukung penyusunan perencanaan dan penganggaran
3	Penguatan kolaborasi antar bidang perencanaan	Penguatan kolaborasi antar bidang perencanaan	Penguatan kolaborasi antar bidang perencanaan
4	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan secara rutin/berkala dan menyeluruh	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan secara rutin/berkala dan menyeluruh	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan secara rutin/berkala dan menyeluruh
5	Peningkatan koordinasi lintas sektor	Peningkatan koordinasi lintas sektor	Peningkatan koordinasi lintas sektor
6	Penguatan kolaborasi perencanaan perangkat daerah	Penguatan kolaborasi perencanaan perangkat daerah	Penguatan kolaborasi perencanaan perangkat daerah

Sumber : Bappeda dan Litbang kabupaten Tegal, 2021



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Program

Perumusan rencana program dan kegiatan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal dilakukan berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati Tegal yang tertuang dalam RPJMD berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Program kerja utama Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Tegal adalah membantu Bupati Tegal dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Tegal, pada dasarnya kegiatan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal ditujukan bagi terlaksananya perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek (tahunan) serta penelitian pengembangan yang dapat digunakan dalam mendukung perencanaan pembangunan.

**Program utama** yang dilaksanakan Bappeda dan Litbang sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan sesuai dengan Sasaran Renstra Bappeda dan Litbang adalah :

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

#### **a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan perencanaan, evaluasi, dan analisis data yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan. Indikator kinerja program ini adalah persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan analisis data pembangunan yang disusun

sesuai tahapan dan Tingkat Kesesuaian rencana dan realisasi pembangunan.

#### **b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian, konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan, sosial dan budaya, serta konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup infrastruktur wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini adalah persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup bidang perekonomian; persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan sosial budaya; serta persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup infrastruktur wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

#### **3. Penelitian dan Pengembangan**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**, yang diarahkan pada kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, serta pengembangan inovasi dan teknologi. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Persentase hasil Kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Selain program utama yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Bappeda dan Litbang, juga dilaksanakan program penunjang yaitu

## **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

### **6.2 Kegiatan**

Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran Bappeda dan Litbang adalah :

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.
  - 1) Pelaksanaan Konsultasi Publik
  - 2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
  - 3) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - 1) Analisis Data dan Informasi Pemerintah daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
  - 2) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan pembangunan Daerah
3. Pengendalian Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan pembangunan Daerah.
  - 1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

- 2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- 3) Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
4. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
  - 1) Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
  - 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
  - 4) Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan dan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan
  - 5) Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - 6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
  - 7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
  - 8) Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan dan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia
5. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
  - 1) Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
  - 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

- 4) Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan dan pembangunan daerah Bidang Perekonomian
  - 5) Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - 6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
  - 7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
  - 8) Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan dan pembangunan daerah Bidang SDA
6. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- 1) Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
  - 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
  - 4) Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan dan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur
  - 5) Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - 6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
  - 7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
  - 8) Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan dan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan
7. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- 1) Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan Pemerintahan Umum

- 2) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
  - 3) Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
8. Penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
    - 1) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
    - 2) Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
    - 3) Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
    - 4) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
    - 5) Penelitian dan Pengembangan Tenaga kerja
    - 6) Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
  9. Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan
    - 1) Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
    - 2) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
    - 3) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
    - 4) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
    - 5) Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    - 6) Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
    - 7) Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
  10. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
    - 1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
    - 2) Uji coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
    - 3) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
    - 4) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan
    - 5) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Selain kegiatan tersebut Bappeda dan Litbang juga melaksanakan kegiatan penunjang yang terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
  - 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
  - 2) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
  - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - 2) Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan
  - 3) Penyediaan bahan logistik kantor
  - 4) penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - 5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - 6) Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1) Pengadaan peralatan gedung kantor
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan
  - 1) Penyediaan jasa surat menyurat
  - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - 3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan
  - 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - 2) Pemeliharaan mebel
  - 3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

#### 4) Pemeliharaan/ rehabilitas gedung kantor atau bangunan lainnya

Rumusan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:



**Tabel 6.1**  
**Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**  
**Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan**  
**(Renstra Murni)**

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun Awal Perencanaan (Realisasi 2018)		Rencana Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Unit Kerja	Lokasi
			Kondisi Awal 2018	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	Program Perencanaan dan Penganggaran Program			1.320.000		1.200.000		1.224.000	Bidang Perencanaan	Bappeda dan Litbang
		Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	100%		100%		100%			
		Persentase keselarasan kebijakan penganggaran antara prioritas kabupaten, provinsi dan nasional.	100%		100%		100%			

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun Awal Perencanaan (Realisasi 2018)		Rencana Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Unit Kerja	Lokasi
			Kondisi Awal 2018	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Output : Buku RKPD ; RKPD Perubahan; Perubahan RPJMD; RPJMD Teknokratik; RPJPD	1 dok ; 1 dok		1 dok (RKPD) ; 1 dok (RKPD Perub.)	950.000	2 dok (RKPD , perubahan RPJMD)	950.000		
		Outcome : Meningkatnya persentase dokumen perencanaan disusun sesuai regulasi	100%		100%		100%			
	2) Sinkronisasi Penganggaran Program	Output : KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan	1 dok ; 1 dok		1 dok ; 1 dok	250.000	1 dok ; 1 dok	274.000		
		Outcome : Meningkatnya persentase dokumen perencanaan disusun sesuai regulasi	100%		100%		100%			
2)	Program Pemerintahan dan			595.000		1.500.000		3.060.000	Bidang Pemkesos	Bappeda dan Litbang

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun Awal Perencanaan (Realisasi 2018)		Rencana Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Unit Kerja	Lokasi
			Kondisi Awal 2018	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		
	Kesejahteraan Sosial									
		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Pemkesos	98,33%		97%		97%			
	1) Koordinasi Pemerintahan	Output : Laporan Bidang Pemerintahan ; dok perencanaan sektoral bidang pemerintahan	1 dok ; 1 dok		1 lap; 1 lap;	250.000	1 lap; 1 lap; 1 lap, 1 lap	760.000		
		Outcome : Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan rumpun pemerintahan	30 OPD		30 OPD		30 OPD			
	2) Koordinasi Kesejahteraan Sosial	Output : Laporan Bidang Kesos ; perencanaan sektoral bidang kesejahteraan sosial	1 dok ; 1 dok		1 lap; 1 program inovatif kewirausahaan pemuda	1.250.000	2 lap; 4 lap	2.300.000		

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun Awal Perencanaan (Realisasi 2018)		Rencana Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Unit Kerja	Lokasi
			Kondisi Awal 2018	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		
		Outcome : Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan rumpun kesejahteraan sosial	8 OPD		8 OPD		8 OPD			
3)	Program Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur			2.715.000		2.750.000	2.650.000		Bidang Ekbangtur	Bappeda dan Litbang
		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur	99,17%		99,17%		97%			
	1) Koordinasi dan Penyusunan dokumen infrastruktur	Output : Dokumen Infrastruktur ; dokumen sektoral infrastruktur	1 dok; 1 dok		1 dok; 4 dok	2.050.000	2 dok; 4 dok	1.785.000		
		Outcome : Meningkatnya keselarasan	4 OPD		4 OPD		4 OPD			

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun Awal Perencanaan (Realisasi 2018)		Rencana Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Unit Kerja	Lokasi
			Kondisi Awal 2018	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		
		dokumen perencanaan rumpun infrastruktur								
	2)Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Bidang Perekonomian	Output : Dokumen Perekonomian ; dokumen sektoral infrastruktur			1 dok; 1 dok;	700.000	1 dok; 1 dok;	865.000		
		Outcome : Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan rumpun perekonomian	6 OPD		6 OPD		6 OPD			
4)	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan			625.000		850.000		867.000	Bidang Dalev.	Bappeda dan Litbang
		Tingkat Kesesuaian rencana dan realisasi kegiatan	82,00%		85,00%		86,00%			
		Tingkat capaian indikator sesuai target	76,70%		85,00%		87,00%			

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun Awal Perencanaan (Realisasi 2018)		Rencana Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Unit Kerja	Lokasi
			Kondisi Awal 2018	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		
	1) Koordinasi Pengendalian Operasional dan Monitoring Kegiatan	Output : Rakor POK; Monitoring kegiatan strategis;			4 rakor POK; 4 Raker Pokja ; 12 lap.bul ; 16 Monitoring ;	575.000	4 rakor POK; 4 Raker Pokja ; 12 lap.bul ; 16 Monitoring ;	577.000		
		Outcome : Meningkatnya kesesuaian rencana dan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan	48 OPD		48 OPD		48 OPD			
	2) Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Daerah	Rakor TEPR A ; Dok LKPJ ; Dok. Evaluasi RKPD			4 Rakor ; 12 Raker; 1 dok LKPJ ; 1 dok Evaluasi	275.000	4 Rakor ; 12 Raker; 1 dok LKPJ ; 1 dok Evaluasi	290.000		
		Outcome : Meningkatnya ketercapaian indikator pembangunan sesuai target	48 OPD		48 OPD		48 OPD			
			63,07%		58,50%		83,29%			

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun Awal Perencanaan (Realisasi 2018)		Rencana Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Unit Kerja	Lokasi
			Kondisi Awal 2018	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		
5)	Program Kelitbangan			1.530.000		1.540.000		570.800	Bidang Litbang	Bappeda dan Litbang
		Persentase produk kelitbangan utama yang termanfaatkan dalam pembangunan daerah	78,79%		84,85%					
	1) Pengelolaan kelitbangan	Output: Kerjasama PTN/PTS (KKN); Insentif Penelitian; Lomba Inovasi; Pameran Inovasi; Lap. SIDA; Lap. DRD; Buku dan Majalah			5 PTN/PTS;24 Mhs/Masy;1 kali;1 kali;1 dok;1 dok;700 eks	725.000	88,57%	570.800		
		Outcome : Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan pengelolaan data dalam perencanaan pembangunan daerah	100,00%		100,00%					

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun Awal Perencanaan (Realisasi 2018)		Rencana Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Unit Kerja	Lokasi
			Kondisi Awal 2018	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		
	2)Koordinasi Pengelolaan Data	Output: Analisis Pemerataan Pendataan (Williamson);Indeks Pembangunan Desa; Lap. Forum Data; Lap. TPID; Informasi data Pembangunan (website)			1 dok;1 dok;1 lap;1 lap;1 website	815.000	12 mhs			
		Outcome : Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan pengelolaan data dalam perencanaan pembangunan daerah	100,00%		100,00%		8 mhs			
6)	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Perangkat Daerah			1.273.500		1.513.250		1.765.500	Sekretaris	Bappeda dan Litbang



Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun Awal Perencanaan (Realisasi 2018)		Rencana Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Unit Kerja	Lokasi
			Kondisi Awal 2018	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		
	Bappeda dan Litbang									
		Persentase pemenuhan layanan umum kepegawaian	100%		100%		100%			
		Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	100%		100%		100%			
	1) Penyediaan jasa kantor	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor ; ATK ; Cetak dan Penggandaan, Perangko dan meterai; Komunikasi, air dan Listrik; Koran			9 jenis; 12 bulan	126.250	9 jenis; 12 bulan	130.500		
	2) Pemeliharaan sarana prasarana kantor	Terlaksananya Pemeliharaan sarana prasarana kantor (gedung kantor ; Mobil, Motor ; AC , Printer, Komputer, PC, Mesin Ketik, LCD, Listrik, CCTV ; Mebeleur; Jaringan			15 jenis ; 1 tahun	750.000	15 jenis ; 1 tahun	940.000		

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun Awal Perencanaan (Realisasi 2018)		Rencana Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Unit Kerja	Lokasi
			Kondisi Awal 2018	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		
		Listrik, Sound System; Faximile)								
	3) Pengadaan sarana prasarana kantor	Terlaksananya pengadaan sarana prasarana kantor dalam 1 tahun			4 jenis	197.000	5 jenis	205.000		
	4) Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Terlaksananya Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			1 Tahun	50.000	1 Tahun	70.000		
	5) Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi			1 Tahun	230.000	1 Tahun	250.000		
	6) Perencanaan Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya dokumen Renja ; RKA ; SPIP ; LKjIP dan Pameran Pembangunan			4 dok ; 2 kali	70.000	4 dok ; 2 kali	70.000		
	7) Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan	Laporan Administrasi Keuangan			5 dok	90.000	5 dok	100.000		

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun Awal Perencanaan (Realisasi 2018)		Rencana Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020		Unit Kerja	Lokasi
			Kondisi Awal 2018	Pagu (000)	Target	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		
		Outcome : Terpenuhinya layanan umum kepegawaian, perencanaan dan keuangan			100%		100%			
	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)(Banprov.)	SDGs ;PMG; TPKD; SIPD; PEL			1 lap; 1 lap; 1 lap; 1 lap; 1 lap	700.000	1 lap; 1 lap; 1 lap; 1 lap	750.000		
TOTAL PAGU INDIKATIF				8.058.500		10.053.250		12.787.300		

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

**Tabel 6.2**  
**Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**  
**Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan**  
**Realisasi Tahun 2020 dan Target Tahun 2021**  
**(Program, Kegiatan dan sub Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)**

KO DE	Program/Kegiatan lama	Program/Kegiatan Permen 90	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan Realisasi 2020		Rencana Kinerja Tahun 2021		Unit Kerja	Lokasi
				Kondisi Awal (Realisasi 2020)	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan Perangkat Daerah Bappeda dan Litbang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan umum kepegawaian	100%	1.513.250		1.543.515	Sekretariat	Bappeda dan Litbang Kab Tegal
			Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan	100%		100%			
	Perencanaan Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan	100%	347.278	100%	367.278		

KO DE	Program/Kegiatan lama	Program/Kegiatan Permen 90	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan Realisasi 2020		Rencana Kinerja Tahun 2021		Unit Kerja	Lokasi
				Kondisi Awal (Realisasi 2020)	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen Renja ; RKA	1 dok		1 dok	357.858		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SPIP ; LKJIP dan Pameran Pembangunan	3 dok; 2 kl		3 dok; 2 kl	9.420		
	Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	87.720	100%	87.720		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Administrasi Keuangan	5 dok		5 dok	87.720		
	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Adm. Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	10.000	100%	10.000		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	12 bulan		12 bulan	10.000		
	Penyediaan jasa kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Adm. Umum Perangkat Daerah	100%	202.700	100%	202.700		

KO DE	Program/Kegiatan lama	Program/Kegiatan Permen 90	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan Realisasi 2020		Rencana Kinerja Tahun 2021		Unit Kerja	Lokasi
				Kondisi Awal (Realisasi 2020)	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 item		5 item	10.000		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis kantor, bahan pembersih	32 item; 23 item		32 item; 23 item	56.600		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah surat terkirim, rekening air, listrik dan telpon,	1 thn		1 thn	43.400		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan Penggandaan,	5 item		5 item	32.000		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar/majalah, peraturan perundang-undangan	12 bulan		12 bulan	10.000		
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan		12 bulan	50.700		
	Pengadaan sarana prasarana kantor	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	352.052	100%	362.317		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Belanja Modal)	Jumlah Komputer PC	1 unit		1 unit	362.317		
			Jumlah Printer	1 unit		1 unit			
			Jumlah Mesin penghancur kertas	1 unit		1 unit			

KO DE	Program/Kegiatan lama	Program/Kegiatan Permen 90	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan Realisasi 2020		Rencana Kinerja Tahun 2021		Unit Kerja	Lokasi
				Kondisi Awal (Realisasi 2020)	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Kursi rapat	10 buah		10 buah			
			Jumlah meja rapat	5 buah		5 buah			
			Jumlah kursi roda	1 unit		1 unit			
			Jumlah Dispenser	6 unit		6 unit			
			Jumlah rak meja	6 unit		6 unit			
			Jumlah karpet	150m2		150m2			
			LCD	4 unit		4 unit			
			Camera, USB video, kabel RCA, cabel HDMI	1 paket		1 paket			
			Kabel jaringan jenset dan tangki bbm	1 paket		1 paket			
			Jumlah wireless mix	1 unit		1 unit			
			Jumlah Podium	1 unit		1 unit			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan	100%	107.000	100%	107.000		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah peranko dan materai	350 buah		350 buah	2.000		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	12 bulan		12 bulan	105.000		
	Pemeliharaan sarana prasarana kantor	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan	1 tahun	406.500	1 tahun	406.500		

KO DE	Program/Kegiatan lama	Program/Kegiatan Permen 90	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan Realisasi 2020		Rencana Kinerja Tahun 2021		Unit Kerja	Lokasi
				Kondisi Awal (Realisasi 2020)	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	servis kendaraan	12 bulan		12 bulan	195.000		
			suku cadang	6 item		6 item			
			BBM	12.614 liter		12.614 liter			
			STNK	12 bulan		12 bulan			
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebeleur	3.571 m2		3.571 m2	10.000		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanya Pemeliharaan AC, CCTV, LCD, sound system, Printer, komputr /laptop	101 buah		101 buah	48.000		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 bulan		12 bulan	153.500		
	Program Perencanaan dan Panganggaran Program	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	100%	2.050.000	100%	2.091.000	Bidang Rendalev	



KO DE	Program/Kegiatan lama	Program/Kegiatan Permen 90	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan Realisasi 2020		Rencana Kinerja Tahun 2021		Unit Kerja	Lokasi
				Kondisi Awal (Realisasi 2020)	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Persentase keselarasan kebijakan penganggaran antara prioritas kabupaten, provinsi dan nasional.	100%		100%			
	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan		Tingkat Kesesuaian rencana dan realisasi kegiatan	86%		86%			
			Tingkat capaian indikator sesuai target	87%		87%			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Meningkatnya persentase dokumen perencanaan disusun sesuai regulasi	100%	1.200.000	100%	1.224.000		
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rakor DAK, Banprov, DBHCJT, system SIPD	8 rakor; 1 system		8 rakor; 1 system	274.000		
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Buku RKPD ; RKPD Perubahan; Perubahan RPJMD; RPJMD Teknokratik; RPJPD	1 dok; 1 dok, 1 dok		1 dok; 1 dok, 1 dok	950.000		

KO DE	Program/Kegiatan lama	Program/Kegiatan Permen 90	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan Realisasi 2020		Rencana Kinerja Tahun 2021		Unit Kerja	Lokasi
				Kondisi Awal (Realisasi 2020)	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi Pengendalian Operasional dan Monitoring Kegiatan	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kesesuaian rencana dan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan	48 OPD	850.000	48 OPD	867.000		
			Meningkatnya ketercapaian indikator pembangunan sesuai target	48 OPD		48 OPD			
	Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rakor TEPRRA ; Dok LKPJ ; Dok. Evaluasi RKPDP	4 Rakor ; 12 Raker; 1 dok LKPJ ; 2 dok Evaluasi		4 Rakor ; 12 Raker; 1 dok LKPJ ; 2 dok Evaluasi	290.000		
	Koordinasi Pengendalian Operasional dan Monitoring Kegiatan	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rakor POK; Monitoring kegiatan strategis;	4 rakor POK; 4 Raker Pokja ; 12 lap.bul ; 16 Monitoring ;		4 rakor POK; 4 Raker Pokja ; 12 lap.bul ; 16 Monitoring ;	577.000		
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM KOORDINASI dan SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Pemkesos	97%	5.600.000	97%	5.712.000		

KO DE	Program/Kegiatan lama	Program/Kegiatan Permen 90	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan Realisasi 2020		Rencana Kinerja Tahun 2021		Unit Kerja	Lokasi
				Kondisi Awal (Realisasi 2020)	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur	99,17%	2.600.000	99,17%			
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Keselarasn dokumen perencanaan rumpun pemerintahan	30 OPD	3.000.000	30 OPD	3.060.000	Bidang PPM	
			Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan rumpun kesejahteraan sosial	8 OPD		8 OPD			
	Koordinasi Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Bidang Pemerintahan ; dok perencanaan sektoral bidang pemerintahan	1 lap; 1 lap		1 lap; 1 lap	760.000		
	Koordinasi Kesejahteraan Sosial	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Bidang Kesos ; perencanaan sektoral bidang kesejahteraan sosial	2 lap; 4 lap		2 lap; 4 lap	2.300.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Bidang Perekonomian	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan rumpun perekonomian	6 OPD		6 OPD	1.306.289	Bid Perekono mian & SDA	

KO DE	Program/Kegiatan lama	Program/Kegiatan Permen 90	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan Realisasi 2020		Rencana Kinerja Tahun 2021		Unit Kerja	Lokasi
				Kondisi Awal (Realisasi 2020)	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen PD bid perekonomian yang mempedomani kebijakan perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 dok		8 dok	288.642		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Perekonomian ; dokumen sektoral Perekonomian	1 dok; 1 dok;		1 dok; 1 dok;	332.193		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen PD bid SDA yang mempedomani kebijakan perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dok		4 dok	685.454		
	Koordinasi dan Penyusunan dokumen infrastruktur	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan rumpun infrastruktur	4 OPD		4 OPD	1.345.711	Bid Infrastruktur	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan PD bid infrastruktur	8 dok		8 dok	263.701		

KO DE	Program/Kegiatan lama	Program/Kegiatan Permen 90	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan Realisasi 2020		Rencana Kinerja Tahun 2021		Unit Kerja	Lokasi
				Kondisi Awal (Realisasi 2020)	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Infrastruktur ; dokumen sektoral infrastruktur	2 dok; 4 dok		2 dok; 4 dok	428.901		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan rumpun kewilayahan	2 dok		2 dok	653.109		
	Program Kelitbangan	PROGRAM PENELITIAN dan PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase produk kelitbangan utama yang termanfaatkan dalam pembangunan daerah	84,85%	1.540.000	88,57%	1.570.800	Bid Litbang	
	Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dan pengelolaan data dalam perencanaan pembangunan daerah	83,29%		83,29%	870.000		
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kerjasama PTN/PTS (KKN) ; Lomba Inovasi ; Pameran Inovasi ; Lap. SIDA : Lap. DRD ; Buku dan Majalah	5 PTN/PTS;		5 PTN/PTS ;	720.000		

KO DE	Program/Kegiatan lama	Program/Kegiatan Permen 90	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan Realisasi 2020		Rencana Kinerja Tahun 2021		Unit Kerja	Lokasi
				Kondisi Awal (Realisasi 2020)	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Bantuan atau insentif penelitian	12 mhs		12 mhs			
			Beasiswa mahasiswa berprestasi	8 mhs		8 mhs			
			Beasiswa hafidz/hafidzoh	10 org		10 org			
			Penelitian atau kajian	5 kajian		5 kajian			
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	4 Tim (DRD, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, Tim Kelitbangan)		4 Tim (DRD, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, Tim Kelitbangan)			
			Penguatan Ketatalaksanaan	2 Dok (SOP/Pedoman Kelitbangan)		2 Dok (SOP/Pedoman Kelitbangan)			
			Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi program	3 dok (RIK, Rencana Kerja Kelitbangan Tahunan,		3 dok (RIK, Rencana Kerja Kelitbang			

KO DE	Program/Kegiatan lama	Program/Kegiatan Permen 90	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan Realisasi 2020		Rencana Kinerja Tahun 2021		Unit Kerja	Lokasi
				Kondisi Awal (Realisasi 2020)	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Laporan Evaluasi Kelitbangan)		an Tahunan, Laporan Evaluasi Kelitbang an)			
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Analisis Pemerataan pendataan (Williamson); Indeks Pembangunan Desa; Laporan Forum data ; Laporan TPID: Informasi data pembangunan (Website)	1 lap; 1 lap; 1 lap; 1 lap; 1 web		1 lap; 1 lap; 1 lap; 1 lap; 1 web	150.000		
			Pengembangan Basis Data Kelitbangan	1 laporan forum data		1 laporan forum data			
	Pengelolaan Inovasi dan Peningkatan Kapasitas Kelitbangan	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Keselarasan dokumen perencanaan rumpun inovasi dan peningkatan kapasitas kelitbangan	100%		100%	700.800		
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Peningkatan Kapasitas SDM	2 jenis pelatihan ( HAKI, Ijin Produksi)		2 jenis pelatihan ( HAKI, Ijin Produksi)	100.800		

KO DE	Program/Kegiatan lama	Program/Kegiatan Permen 90	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan Realisasi 2020		Rencana Kinerja Tahun 2021		Unit Kerja	Lokasi
				Kondisi Awal (Realisasi 2020)	Pagu (000)	Target	Pagu (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penguatan Kerjasama Kelitbangan	3 kerjasama ( KKN PT/PTS, Fasilitasi pemasaran produk Inovasi, Fasilitasi Ijin Produksi)		3 kerjasam a ( KKN PT/PTS, Fasilitasi pemasar an produk Inovasi, Fasilitasi Ijin Produksi)			
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Buku atau majalah penelitian	700 eks		700 eks	600.000		
			Fasilitasi Inovasi Daerah	1 lomba Inovasi Daerah		1 lomba Inovasi Daerah			
TOTAL					10.703.250		10.917.315		

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

**Tabel 6.3**  
**Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**  
**Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan**  
**(Perubahan Renstra)**



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja
				Kinerja	Pagu	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAH											
	Urusan Perencanaan											
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				1.885.000.000		1.903.850.000		2.450.000.000		6.238.850	
		Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan dan Kebijakan anggaran	100	100		100		100		100		
		Persentase hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti	75	75		80		85		85		
	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Daerah	Persentase tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang dilaksanakan	100	100	1.025.000.000	100	1.025.000.000	100	1.440.000.000	100	3.490.000.000	
	1) Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terselenggaranya Konsultasi Publik	1 kali	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	150.000.000	
	2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Musrenbang Kabupaten	1 kali	1 kali	130.000.000	1 kali	130.000.000	1 kali	300.000.000	1 kali	560.000.000	
	3) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen RPJPD, RPJMD Teknokratik, RKPD, RKPD Perubahan	2 dok	2 dok	845.000.000	2 dok	845.000.000	4 dok	1.090.000.000	4 dok	2.780.000.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja
				Kinerja	Pagu	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota											
	2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	99	99	260.000.000	99	260.000.000	99	360.000.000	99	880.000.000	
	1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah	1 Dok	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	300.000.000	1 Dok	700.000.000	
	2) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Pembangunan Daerah	1 dok	1 dok	60.000.000	1 dok	60.000.000	1 dok	60.000.000	1 dok	180.000.000	
	3. Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi yang dihasilkan atas pengendalian evaluasi dan pelaporan	100	100	600.000.000	100	618.850.000	100	650.000.000	100	1.868.850.000	
	1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan evaluasi hasil RKPd	1 laporan	1 laporan	200.000.000	1 laporan	218.850.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	668.850.000	
		LKPJ dan AMJ LKPJ	1 Dok	1 Dok		2 Dok		1 Dok		1 Dok		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja
				Kinerja	Pagu	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Laporan evaluasi RPJMD	-	-		-		1 laporan		1 laporan		
		Laporan evaluasi RPJPD						1 laporan		1 laporan		
	2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rakor TEPR	2 kali	2 kali	300.000.000	2 kali	300.000.000	2 kali	300.000.000	2 kali	900.000.000	
		Laporan DAK	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		
		Laporan Banprov	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		
	3) Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	1 laporan	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	300.000.000	
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	91,22	91,56	1.885.000.000	91,77	1.903.850.000	91,98	2.450.000.000	91,98	4.913.054.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja
				Kinerja	Pagu	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Perekonomian dan SDA	92,88	93,12		93,17		93,23		93,23		
		Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	93,02	93,24		93,45		93,59		93,59		
	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		0		659.600.000		666.196.000		859.500.000		859.500.000	
		Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan yang selaras	91,86	92,19		92,19		92,19		92,19		
		Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pembangunan Manusia yang selaras	91,12	91,56		91,88		92,19		92,19		
		Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang selaras	90,66	90,94		91,25		91,56		91,56		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja
				Kinerja	Pagu	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1) Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen PD bid pemerintahan yang mempedomani kebijakan perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60 dok koordinasi	60 dok koordinasi	55.000.000	60 dok koordinasi	55.000.000	60 dok koordinasi	80.000.000	60 dok koordinasi	190.000.000	
	2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	jumlah dokumen PD bidang pemerintahan yg disusun sesuai tahapan (Renja dan Renstra)	60 dok koordinasi	60 dok koordinasi	55.000.000	60 dok koordinasi	55.000.000	60 dok koordinasi	80.000.000	60 dok koordinasi	190.000.000	
	3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan PD bid pemerintahan	120 dok monev	120 dok monev	75.000.000	120 dok monev	75.000.000	120 dok monev	80.000.000	120 dok monev	230.000.000	
	4) Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan rumpun pemerintahan	1 dok sinergitas	1 dok sinergitas	55.000.000	1 dok sinergitas	55.000.000	1 dok sinergitas	100.000.000	1 dok sinergitas	210.000.000	
	5) Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan	jumlah dokumen PD bidang PM dan Kesmas yg disusun sesuai tahapan (Renja dan Renstra)	16 dok koordinasi	16 dok koordinasi	100.000.000	16 dok koordinasi	100.000.000	16 dok koordinasi	125.000.000	16 dok koordinasi	325.000.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja
				Kinerja	Pagu	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
	6) Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan PD bid PM dan Kesmas	16 dok asistensi	16 dok asistensi	100.000.000	16 dok asistensi	100.000.000	16 dok asistensi	125.000.000	16 dok asistensi	325.000.000	
	7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan PD bid PM & Kesmas	32 dok monev	32 dok monev	125.000.000	32 dok monev	125.000.000	32 dok monev	125.000.000	32 dok monev	375.000.000	
	8) Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan rumpun PM & Kesmas	3 dok sinergitas	3 dok sinergitas	94.600.000	3 dok sinergitas	101.196.000	3 dok sinergitas	144.500.000	3 dok sinergitas	340.296.000	
	2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA				496.400.000		501.364.000		644.300.000		1.642.064.000	
		Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Perekonomian yang selaras	92	92,42		92,45		92,5		92,5		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja
				Kinerja	Pagu	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang SDA yang selaras	94	93,82		93,89		93,97		93,97		
	1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen PD bid perekonomian yang mempedomani kebijakan perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 dok	8 dok	90.000.000	8 dok	94.964.000	8 dok	99.500.000	8 dok	284.464.000	
	2) Asistensi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	jumlah dokumen PD bidang perekonomian yg disusun sesuai tahapan (Renja dan Renstra)	8 dok	8 dok	90.000.000	8 dok	90.000.000	8 dok	95.000.000	8 dok	275.000.000	
	3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan PD bid perekonomian	16 dok	16 dok	51.400.000	16 dok	51.400.000	16 dok	80.000.000	16 dok	182.800.000	
	4) Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan rumpun perekonomian	2 dok	2 dok	50.000.000	2 dok	50.000.000	2 dok	75.000.000	2 dok	175.000.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja
				Kinerja	Pagu	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5) Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen PD bid SDA yang mempedomani kebijakan perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dok	4 dok	85.000.000	4 dok	85.000.000	4 dok	90.000.000	4 dok	260.000.000	
	6) Asistensi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	jumlah dokumen PD bidang SDA yg disusun sesuai tahapan (Renja dan Renstra)	4 dok	4 dok	40.000.000	4 dok	40.000.000	4 dok	75.000.000	4 dok	155.000.000	
	7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan PD bid SDA	8 dok	8 dok	50.000.000	8 dok	50.000.000	8 dok	64.800.000	8 dok	164.800.000	
	8) Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan rumpun SDA	2 dok	2 dok	40.000.000	2 dok	40.000.000	2 dok	65.000.000	2 dok	145.000.000	
					729.000.000		736.290.000		946.200.000		2.411.490.000	



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja
				Kinerja	Pagu	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Infrastruktur yang selaras	91,65	92,15		92,48		92,6		92,6		
		Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Wilayah yang selaras	94	94,32		94,42		94,58		94,58		
	1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen PD bid infrastruktur yang mempedomani kebijakan perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dok	4 dok	45.000.000	4 dok	47.290.000	4 dok	67.290.000	4 dok	159.580.000	
	2) Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	jumlah dokumen PD bidang infrastruktur yg disusun sesuai tahapan (Renja dan Renstra)	4 dok	4 dok	50.000.000	4 dok	50.000.000	4 dok	70.710.000	4 dok	170.710.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja
				Kinerja	Pagu	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3) Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan PD bid infrastruktur	8 dok	8 dok	75.000.000	8 dok	75.000.000	8 dok	95.000.000	8 dok	245.000.000	
	4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan rumpun infrastruktur	2 dok	2 dok	185.000.000	2 dok	185.000.000	2 dok	233.200.000	2 dok	603.200.000	
	5) Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen PD bid kewilayahan yang mempedomani kebijakan perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dok	4 dok	45.000.000	4 dok	50.000.000	4 dok	70.000.000	4 dok	165.000.000	
	6) Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	jumlah dokumen PD bidang kewilayahan yg disusun sesuai tahapan (Renja dan Renstra)	4 dok	4 dok	59.000.000	4 dok	59.000.000	4 dok	80.000.000	4 dok	198.000.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja
				Kinerja	Pagu	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang kewilayahan	jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan/hasil dokumen perencanaan PD bid kewilayahan	8 dok	8 dok	75.000.000	8 dok	75.000.000	8 dok	95.000.000	8 dok	245.000.000	
	8) Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	jumlah dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan rumpun kewilayahan	2 dok	2 dok	195.000.000	2 dok	195.000.000	2 dok	235.000.000	2 dok	625.000.000	
	Urusan Penelitian dan Pengembangan											
					1.318.771.000		1.331.959.000		1.331.959.000		3.982.689.000	
	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Dukungan Produk Kelitbang dalam Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	65	72,5		73,44		87,5		87,5		
		Skor Inovasi	4035	4.500		5.000		5.500		5.500		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja
				Kinerja	Pagu	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah rekomendasi litbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	71,35	72,5	180.000.000	73,44	180.000.000	87,5	180.000.000	87,5	540.000.000	
	1) Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan Pemerintahan umum	Jumlah Rekomendasi Kajian Mandiri mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1 dok rekomendasi	1 dok rekomendasi	75.000.000	1 dok rekomendasi	75.000.000	1 dok rekomendasi	75.000.000	1 dok rekomendasi	225.000.000	
	2) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Laporan Forum Data Kelitbangan	1 laporan	1 laporan	75.000.000	1 laporan	75.000.000	1 laporan	75.000.000	1 laporan	225.000.000	
	3) Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).	1 laporan	1 laporan	30.000.000	1 laporan	30.000.000	1 laporan	30.000.000	1 laporan	90.000.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja
				Kinerja	Pagu	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Rekomendasi Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan mendukung Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	91,89	91,89	220.271.000	91,89	240.459.000	91,89	240.459.000	91,89	701.189.000	
	1) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Mahasiswa Berprestasi dan insentif penelitian mahasiswa/ masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal	7 Mahasiswa Berprestasi dan 7 Dokumen Rekomendasi	7 Mahasiswa Berprestasi dan 7 Dokumen Rekomendasi	155.271.000	7 Mahasiswa Berprestasi dan 7 Dokumen Rekomendasi	115.459.000	7 Mahasiswa Berprestasi dan 7 Dokumen Rekomendasi	115.459.000	7 Mahasiswa Berprestasi dan 7 Dokumen Rekomendasi	386.189.000	
	2) Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Rekomendasi Litbang tematik Bidang Kepemudaan dan Olahraga mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1 penelitian tematik	1 penelitian tematik		1 penelitian tematik	35.000.000	1 penelitian tematik	35.000.000	1 penelitian tematik	70.000.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja
				Kinerja	Pagu	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3) Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Rekomendasi Litbang tematik Bidang Pariwisata mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1 Penelitian tematik	1 Penelitian tematik		1 Penelitian tematik	35.000.000	1 Penelitian tematik	35.000.000	1 Penelitian tematik	70.000.000	
	4) Penelitian dan pengembangan Kesehatan	Jumlah Rekomendasi Litbang tematik Bidang Kesehatan mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1 penelitian tematik	1 penelitian tematik		1 penelitian tematik	35.000.000	1 penelitian tematik	35.000.000	1 penelitian tematik	70.000.000	
	5) Penelitian dan Pengembangan Tenaga kerja	Jumlah Rekomendasi Litbang tematik Bidang Tenaga Kerja mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1 Penelitian tematik	1 Penelitian tematik	40.000.000	1 Penelitian tematik		1 penelitian tematik		1 penelitian tematik	40.000.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja
				Kinerja	Pagu	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6) Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Rekomendasi Litbang tematik Partisipasi Masyarakat mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	3 penelitian masyarakat	3 penelitian masyarakat	25.000.000	3 penelitian masyarakat	20.000.000	3 penelitian masyarakat	20.000.000	3 penelitian masyarakat	65.000.000	
	3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terpenuhi	91,89	91,89	298.500.000	91,89	308.500.000	91,89	308.500.000	91,89	915.500.000	
	1) Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Rekomendasi Litbang Tematik Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1 penelitian tematik	1 penelitian tematik		1 penelitian tematik	35.000.000	1 penelitian tematik	35.000.000	1 penelitian tematik	70.000.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja
				Kinerja	Pagu	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Rekomendasi Litbang Tematik Bidang Perindustrian dan Perdagangan mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1 penelitian tematik	1 penelitian tematik	40.000.000	1 penelitian tematik	35.000.000	1 penelitian tematik	35.000.000	1 penelitian tematik	110.000.000	
	3) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Rekomendasi Litbang Tematik Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1 Penelitian tematik	1 Penelitian tematik	40.000.000	1 penelitian tematik	35.000.000	1 penelitian tematik	35.000.000	1 penelitian tematik	110.000.000	
	4) Penelitian dan pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi Litbang tematik Partisipasi Masyarakat mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1 Penelitian tematik	1 Penelitian tematik	40.000.000	1 penelitian tematik	35.000.000	1 penelitian tematik	35.000.000	1 penelitian tematik	110.000.000	



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja
				Kinerja	Pagu	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5) Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rekomendasi Litbang Tematik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1 Penelitian tematik	1 Penelitian tematik	40.000.000	1 penelitian tematik	35.000.000	1 penelitian tematik	35.000.000	1 penelitian tematik	110.000.000	
	6) Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Rekomendasi Litbang Tematik Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1 Kajian Kawasan Perdesaan	1 Kajian Kawasan Perdesaan	98.500.000	1 Kajian Kawasan Perdesaan	98.500.000	1 Kajian Kawasan Perdesaan	98.500.000	1 Kajian Kawasan Perdesaan	295.500.000	
	7) Penelitian dan pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Rekomendasi Litbang Tematik Bidang Komunikasi dan Informatika mendukung Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi	1 Penelitian tematik	1 Penelitian tematik	40.000.000	1 penelitian tematik	35.000.000	1 penelitian tematik	35.000.000	1 penelitian tematik	110.000.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja
				Kinerja	Pagu	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pembangunan Daerah.										
	4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Jumlah produk inovasi yang dikembangkan.	87,4	87,4	620.000.000	87,4	603.000.000	87,4	603.000.000	87,4	1.826.000.000	
	1) Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Produk Inovasi yang dihasilkan dalam kontes KreNOVA	9 produk Inovasi dalam kontes KreNOVA.	9 produk Inovasi dalam kontes KreNOVA.	200.000.000	1 Kontes KreNOVA	198.000.000	1 Kontes KreNOVA	198.000.000	1 Kontes KreNOVA	596.000.000	
	2) Uji coba dan Penerapan rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Komunitas Inovasi Masyarakat yang berkembang dan mandiri.	2 komunitas berkembang dan mandiri	2 komunitas berkembang dan mandiri	130.000.000	2 komunitas berkembang dan mandiri	130.000.000	2 komunitas berkembang dan mandiri	130.000.000	2 komunitas berkembang dan mandiri	390.000.000	
		Jumlah Desa yang Mendapat Pendampingan Sistem Inovasi Daerah.	1 desa, 1 inovasi	1 desa, 1 inovasi		1 desa, 1 inovasi		1 desa, 1 inovasi		1 desa, 1 inovasi		
		Jumlah Fasilitas dan Pemanfaatan Hasil Inovasi Lembaga/ Perguruan Tinggi.	5 inovasi PTN/PTS	5 inovasi PTN/PTS		5 Inovasi PTN/PTS		5 Inovasi PTN/PTS		5 Inovasi PTN/PTS		

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja
				Kinerja	Pagu	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	Jumlah OPD yang mendapat Fasilitas Penyelenggaraan Inovasi (IGA, KIPP, PUJA INDAH)	48 OPD	48 OPD	75.000.000	48 OPD	70.000.000	48 OPD	70.000.000	48 OPD	215.000.000	
	4) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	website bappeda dan litbang yang informatif dan update	1 website	1 website	115.000.000	1 website	105.000.000	1 website	105.000.000	1 website	325.000.000	
		Jumlah majalah yang diterbitkan	500 eksemplar	500 eksemplar		500 eksemplar		500 eksemplar		500 eksemplar		
	5) Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Fasilitas HAKI Kreator dan Inovator Kabupaten Tegal	2 produk	2 produk	100.000.000	2 produk	100.000.000	2 produk	100.000.000	2 produk	300.000.000	
	NON URUSAN											
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100	100	4.828.458.000	100	4.878.458.000	100	4.928.458.000	100	14.635.374.000	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Tersusunnya dokumen perencanaan	100	100	54.500.000	100	54.500.000	100	54.500.000	100	163.500.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Renja	1 Dok	1 Dok	44.500.000	1 Dok	44.500.000	1 Dok	44.500.000	1 Dok	133.500.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja
				Kinerja	Pagu	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja (LKJIP, PMPRB, SAKIP)	3 dok	3 dok	10.000.000	3 dok	10.000.000	3 dok	10.000.000	3 dok	30.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	2.997.429.000	100	3.047.429.000	100	3.097.429.000	100	9.142.287.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Gaji dan Tunjangan ASN	12 bln	12 bln	2.907.429.000	12 bln	2.957.429.000	12 bln	3.007.429.000	12 bln	8.872.287.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi keuangan	5 dok	5 dok	90.000.000	5 dok	90.000.000	5 dok	90.000.000	5 dok	270.000.000	
		Jumlah honor pengelola keuangan yang dibayarkan	12 bln	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Adm. Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	120.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Diklat Bintel yang diikuti	12 bln	12 bln	40.000.000	12 bln	40.000.000	12 bln	40.000.000	12 bln	120.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kebutuhan Adm. Umum Perangkat Daerah	100	100	303.500.000	100	303.500.000	100	303.500.000	100	910.500.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja
				Kinerja	Pagu	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50 buah	50 buah	20.000.000	50 buah	20.000.000	50 buah	20.000.000	50 buah	60.000.000	
	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	32 item	32 item	70.000.000	32 item	70.000.000	32 item	70.000.000	32 item	210.000.000	
		Jumlah Jenis Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	23 item	23 item		23 item		23 item		23 item		
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pegawai, tamu, dan peserta rapat mendapatkan jamuan	12 bln	12 bln	66.500.000	12 bln	66.500.000	12 bln	66.500.000	12 bln	199.500.000	
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	5 item	5 item	35.000.000	5 item	35.000.000	5 item	35.000.000	5 item	105.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	12 bln	12 bln	12.000.000	12 bln	12.000.000	12 bln	12.000.000	12 bln	36.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	12 bln	12 bln	100.000.000	12 bln	100.000.000	12 bln	100.000.000	12 bln	300.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	100	355.200.000	100	355.200.000	100	355.200.000	100	1.065.600.000	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya				355.200.000		355.200.000		355.200.000		1.065.600.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja
				Kinerja	Pagu	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Kursi rapat		75 unit		0 unit		0 unit		75 unit		
		Jumlah AC		1 unit		1 unit		1 unit		3 unit		
		Jumlah Kursi kerja eselon IV		4 unit		0 unit		0 unit		4 unit		
		Jumlah Meja rapat		2 unit		0 unit		0 unit		2 unit		
		Jumlah Gasebo lengkap		0 unit		1 unit		0 unit		1 unit		
		Jumlah almari arsip		0 unit		1 unit		2 unit		3 unit		
		Jumlah camera mirrorless		0 unit		1 unit		0 unit		1 unit		
		Jumlah drone		0 unit		1 unit		1 unit		1 unit		
		Jumlah laptop		0 unit		2 unit		5 unit		7 unit		
		Jumlah Printer		0 unit		2 unit		5 unit		7 unit		
		CCTV		0 unit		1 unit		1 unit		2 unit		
		Jumlah LCD		0 unit		1 unit		1 unit		2 unit		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan	Persentase ketersediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	201.748.000	100	201.748.000	100	201.748.000	100	605.244.000	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah perangkat dan materai	350 buah	350 buah	2.000.000	350 buah	2.000.000	350 buah	2.000.000	350 buah	6.000.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	12 bln	12 bln	188.000.000	12 bln	188.000.000	12 bln	188.000.000	12 bln	564.000.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bpjs kesehatan thl yang terbayarkan	12 bln	12 bln	11.748.000	12 bln	11.748.000	12 bln	11.748.000	12 bln	35.244.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kondisi Awal 2020	2022		2023		2024		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja
				Kinerja	Pagu	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan	Terlaksananya Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	876.081.000	100	876.081.000	100	876.081.000	100	2.628.243.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	servis kendaraan	1 tahun	1 tahun	252.000.000	1 tahun	252.000.000	1 tahun	252.000.000	1 tahun	756.000.000	
		suku cadang	59 buah	59 buah		59 buah		59 buah		59 buah		
		BBM	12.614 liter	12.614 liter		12.614 liter		12.614 liter		12.614 liter		
		STNK	1 tahun	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		
	Pemeliharaan mebel	Jumlah pemeliharaan mebeleur	1.785 m2	1.785 m2	10.000.000	1.785 m2	10.000.000	1.785 m2	10.000.000	1.785 m2	30.000.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang terpelihara	99 buah	99 buah	89.000.000	99 buah	89.000.000	99 buah	89.000.000	99 buah	267.000.000	
	Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya	12 bln	12 bln	525.081.000	12 bln	525.081.000	12 bln	525.081.000	12 bln	1.575.243.000	
	TOTAL PAGU				9.917.229.000		10.018.117.000		11.160.417.000		23.537.355.850	

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1 Tujuan Sasaran RPJMD**

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tegal 2019- 2024 sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dan harus dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal. Bappeda dan Litbang sesuai tupoksinya bertugas untuk mendukung pencapaian Misi 1 RPJMD Kab. Tegal Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat”. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah “Mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan” dengan sasaran “Meningkatnya kualitas manajemen kinerja”. Indikator yang ditetapkan atas sasaran tersebut adalah nilai SAKIP Kabupaten.

Bappeda dan Litbang juga mendukung Misi 3 yaitu “Membangun Perekonomian Rakyat yang kokoh, Maju, Berekeadilan dan Berkelanjutan”. Adapun tujuan yang akan dicapai yaitu “Mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan dan pariwisata” dengan sasaran meningkatnya produktifitas sektor pertanian, meningkatnya sektor produktifitas di sektor industri pengolahan, meningkatnya produktivitas pariwisata, meningkatnya produktifitas sektor perdagangan”. Indikator yang ditetapkan adalah laju PDRB masing-masing sektor tersebut.

**Tabel 7.1**

**Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang Mengacu Pada RPJMD  
(Renstra Murni)**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2018	2020	2021	
1	Indeks Keselarasan Perencanaan pembangunan Daerah	95,37	95,80	96,88	96,88
2	Indeks Kelitbangan	63,07	58,50	83,29	83,29

*Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021*



**Tabel 7.2**  
**Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang Mengacu Pada RPJMD**  
**(Renstra Perubahan)**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	
1	Indeks Perencanaan dan Kelitbangan	87,5	88,76	90,61	92,37	92,37
2	Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	90,42	90,58	91,68	92,76	92,76
3	Indeks Kelitbangan	78,72	87,40	91,18	94,70	94,70
4	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

## 7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Indikator kinerja utama perangkat daerah ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut telah dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal yang mengacu pada RPJMD 2019-2024 dan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Bappeda dan Litbang dalam lima tahun mendatang.

Target IKU Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan dan menjadi bahan pelaporan kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal selama lima tahun ke depan. Adapun indikator kinerja utama Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah seperti tertuang dalam tabel 7.2.a dan perubahan indikator Kinerja Utama Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 adalah seperti tertuang dalam tabel 7.2.b berikut ini.

**Tabel 7.3**  
**Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang Mengacu pada RPJMD**  
**(Renstra Murni)**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2018	2020	2021	
1	Indeks Keselarasan Perencanaan pembangunan Daerah	95,37	95,80	96,88	96,88
2	Indeks Kelitbangan	63,07	58,50	83,29	83,29
3	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	100	100	100	100
4	Persentase Keselarasan Kebijakan Penganggaran antara prioritas kabupaten, provinsi, dan nasional	100	100	100	100
5	Persentase Dokumen perencanaan rumpun pemkesos	98,33	98,75	97	98,75
6	persentase dokumen perencanaan rumpun ekbangtur	99,17	99,17	97	99,17
7	tingkat kesesuaian rencana dan realisasi kegiatan	82	85	86	86
8	tingkat capaian indikator sesuai target	76,7	85	86	87
9	Persentase Produk Kelitbangan utama yang termanfaatkan dalam pembangunan daerah	78,79	84,85	88,57	88,57

*Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021*

**Tabel 7.4**  
**Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang Mengacu pada RPJMD**  
**(Renstra Perubahan)**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	
1	Indeks Perencanaan dan Kelitbangan	87,5	88,76	90,61	92,37	92,37
2	Indeks Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	90,42	90,58	91,68	92,76	92,76
3	Indeks Kelitbangan	78,72	87,40	91,18	94,70	94,70
4	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100
5	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	100	100	100	100	100
6	Persentase hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti	75	75	80	85	85
7	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	91,22	91,56	91,77	91,98	91,98
8	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Perekonomian dan SDA	92,88	93,12	93,17	93,23	93,23
9	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	93,02	93,24	93,45	93,59	93,59
10	Persentase Dukungan Produk Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	65	72,5	73,44	87,5	87,5
10	Skor Inovasi	50,5	70	75	80	85

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 merupakan acuan bagi segenap aparat di lingkungan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal khususnya dan perangkat pemerintah daerah umumnya dalam penyelenggaraan pembangunan. Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan Litbang 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan Bappeda dan Litbang serta benar-benar dapat mendukung pencapaian visi misi Bupati Tegal 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam perjalanannya Renstra yang telah dibuat di Tahun 2019 mengalami perubahan di Tahun 2021 karena adanya peraturan baru. Untuk itu Renstra Perubahan ini dibuat untuk menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Perubahan Renstra ini telah di sesuaikan dengan Visi Misi Bupati Tegal yang tertuang dalam Perubahan RPJMD dan telah disesuaikan dengan Renstra Kementrian PPN/Bappenas RI dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada kurun waktu yang ditentukan sehingga pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Selain itu juga dapat digunakan masyarakat dalam berpartisipasi mendukung pembangunan di Kabupaten Tegal.

Demikian Perubahan Renstra ini disusun untuk dipedomani Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal.

Slawi, 10 Juni 2021

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. TEGAL

**BAMBANG KUSNANDAR ARIBAWA, SP., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NPE 19690326 199403 1 004

